

Peningkatan
MUTU PENDIDIKAN

UPAYA MENGURANGI
DISPARITAS MUTU PENDIDIKAN
DI KOTA BANJARMASIN

Dr. Yahya Mof, M.Pd., dkk.

Peningkatan
MUTU PENDIDIKAN

Peningkatan
MUTU PENDIDIKAN

UPAYA MENGURANGI
DISPARITAS MUTU PENDIDIKAN
DI KOTA BANJARMASIN

Dr. Yahya Mof, M.Pd
Dr. Ahmad Salabi, S.Ag, M.Pd
Afifah Linda Sari, M.Pd
Dr. M. Daud Yahya, S.Ag, M.Ag



Bekerja sama dengan:
PUSJIBANG-PI
FTK UIN Antasari
Gedung PSB Lt. 2 UIN Antasari
Email: pusjibang@uin-antasari.ac.id



Diterbitkan:
CV. ASWAJA PRESSINDO
Anggota IKAPI No 071 / DIY / 2011
Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani, Yogyakarta
Telp (0274) 4462377
Email: aswajapressindo@gmail.com
Website: www.aswajapressindo.co.id



**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(UPAYA MENGURANGI
DISPARITAS MUTU PENDIDIKAN
DI KOTA BANJARMASIN)**

Oleh:

Dr. Yahya Mof, M.Pd

Dr. Ahmad Salabi, S.Ag, M.Pd

Afifah Linda Sari, M.Pd

Dr. M. Daud Yahya, S.Ag, M.Ag

Aswaja Pressindo

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(UPAYA MENGURANGI DISPARITAS MUTU PENDIDIKAN
DI KOTA BANJARMASIN)**

Penulis :

Dr. Yahya Mof, M.Pd , Dr. Ahmad Salabi, S.Ag, M.Pd
Afifah Linda Sari, M.Pd , Dr. M. Daud Yahya, S.Ag, M.Ag

Cetakan I: Juni 2020

Allright reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

viii +130 Halaman; 14.5 x 20.5 cm

ISBN : 978-623-7593-29-4

Desain Sampul : Agung Istiadi

Layout : Rini

Diterbitkan oleh :

Aswaja Pressindo

Anggota IKAPI No.071/DIY/2011

Jl.Plosokuning V/73, Minomartani, Sleman, Yogyakarta

Telp.(0274) 4462377

E-mail: aswajapressindo@gmail.com

Bekerjasama dengan :

Pusjibang-PI FTK UIN Antasari Banjarmasin

Gedung PSB Lt. 2 UIN Antasari

Email : pusjibang@uin-antasari.ac.id

Kata Sambutan Wakil Dekan I FTK UIN Antasari

Alhamdulillah selalu kita haturkan kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Saya menyambut baik penerbitan buku hasil penelitian Pusjibang-PI FTK UIN Antasari ini. Hal ini sejalan penguatan akreditasi. Mudah-mudahan akan terbit lagi buku-buku lainnya dimasa yang akan datang.

Demikian, selamat membaca.

Banjarmasin, 15 Mei 2020

**Wakil Dekan I
FTK UIN Antasari,**

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag

Kata Pengantar Ketua Pusjibang-PI FTK UIN Antasari

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan atas penerbitan buku. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

Buku yang terbit tahun 2020 di hadapan pembaca sekalian ini merupakan buku terbitan kedua Pusjibang-PI FTK UIN Antasari setelah buku terbitan pertama pada tahun 2019 yang lalu.

Buku ini merupakan hasil penelitian kerjasama Pusjibang-PI FTK UIN Antasari dengan Balitbangda Banjarmasin. Terima kasih kepada tim peneliti yang telah memberikan sumbangsih penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Kerjasama Pusjibang-PI FTK UIN Antasari dengan Balitbangda Banjarmasin telah lama dilakukan yang dirintis oleh Dr.Wahyuddin, M.Pd. Sehingga sampai sekarang Pusjibang-PI FTK UIN Antasari sudah beberapa kali mendapat proyek penelitian dari Balitbangda.

Sejak 2019, ada program penerbitan buku. Sehingga diharapkan baik pengurus maupun dosen FTK UIN Antasari lainnya bisa memberikan kontribusi terhadap program ini.

Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian dan mendapat pahala Amin YRA.

Banjarmasin, 5 Juni 2020

**Ketua Pusjibang-PI
FTK UIN Antasari,**

Dr.M.Daud Yahya, S.Ag, M.Ag

Daftar Isi

Kata Sambutan Wakil Dekan I FTK UIN Antasari	iii
Kata Pengantar Ketua Pusjibang-PI FTK UIN Antasari	v
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : Peningkatan Mutu Pendidikan	13
Bab III : Pemetaan Masalah Mutu Pendidikan	65
Bab IV : Berbagai Upaya Pengurangan Disparitas Mutu Pendidikan di Kota Banjarmasin	119
Daftar Pustaka	127
Profil Para Penulis	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena pendidikan dapat menjadi sebuah upaya untuk menjamin kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹

Pendidikan dapat dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuannya jika telah memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.” (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.7.

Pendidikan Nasional yang meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Pendidikan diupayakan terlaksana dengan memenuhi standarnya, hal ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan keluarga sehingga diperlukan wadah penyelenggaraan pendidikan agar semua pihak dapat bekerjasama melaksanakan amanat undang-undang. Salah satu bentuk wadah penyelenggaraan pendidikan terdapat pada jenjang pendidikan dasar sebagai titik awal dari pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Dasar. Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan formal paling rendah yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 7-14 tahun.²

Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Nasional membuat terobosan baru dalam peningkatan mutu dengan konsep pengelolaan pendidikan yang berbasis pada sekolah. Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator

² Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana. *Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h.20.

mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang berarti. Di beberapa sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu: *Pertama*, Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekwen, pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* pendidikan, seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana lainnya terpenuhi, maka mutu pendidikan otomatis akan meningkat. Namun dalam kenyataannya, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam mengadakan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada *input* pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan, padahal proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Kedua, Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara *birokratik sentralistik*, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung kepada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang, dan kadang-kadang kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Ketiga, Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam menyelenggarakan pendidikan pada umumnya selama ini sangat minim, partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan), monitoring, evaluasi dan akuntabilitas. Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dalam pendidikan.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Husaini Usman ada *tiga faktor* yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil. *Pertama* strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input-oriented*. Strategi yang demikian lebih berstandar kepada asumsi bahwa bilamana semua *input* pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) lulusan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* yang diperkenalkan oleh teori *education production function* tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industry (Hanushek, 1979, 1981). *Kedua* pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat *makro* (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat *mikro* (sekolah). Atau dapat dikatakan bahwa kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat dipikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat; *Ketiga* peran

semua masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.³

Berdasarkan kenyataan di atas, sudah barang tentu harus dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan tinjauan kembali penyelenggaraan pendidikan yaitu proses manajemen peningkatan mutu *berbasis pusat* menuju manajemen peningkatan mutu *berbasis sekolah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) membuat kebijakan sebagai berikut: *Pertama*, strategi peningkatan mutu berbasis sekolah (*school based strategy*) dimana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; *Kedua*, pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (*community based education*) di mana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah disini diposisikan sebagai *community learning center*; dan *Ketiga*, dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma yang akan menjadikan para pendidik atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan.

Dunia pendidikan telah melirik konsep-konsep yang menaruh minat secara mendalam terhadap perbaikan *input*, proses dan *output* yang berkualitas, salah satunya adalah konsep *Total Quality Management*. Oleh karena itu, mutu menjadi satu-satunya hal yang sangat penting dalam pendidikan. Kemudian dalam perspektif *Total Quality Management*, pendidikan adalah sebuah lembaga yang menyediakan dan menghasilkan produk berupa jasa (*service*) dan merupakan transformasi menuju

³ Husaini Usman, *Peran Baru Administrasi Pendidikan dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik*, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, Februari 2001, Jilid 8, Nomor 1.

sekolah bermutu terpadu yang diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh kepala sekolah, komite sekolah, guru, administrator, staf, siswa, dan komunitas⁴

Total Quality Management merupakan salah satu usaha agar dapat meningkatkan mutu sekolah dengan melalui perbaikan terus menerus berkesinambungan atas kualitas produk, jasa manusia, proses dan lingkungan organisasi.⁵ Kemudian dalam peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang menjadi kebijakan pemerintah di atas, maka banyak sekolah yang memulai memperbaiki mutu. Dan manajemen pendidikan yang handal menjadi kunci bagi penciptaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas.

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas pendidikan, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha membangun pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.⁶

Berdasarkan data dari BPS, terdapat disparitas kualitas pendidikan antar kecamatan yang besar antar kecamatan-kecamatan di Kota Banjarmasin, khususnya antara Kecamatan

⁴ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Cet. III, trj. Yosol Iriantara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 10.

⁵ Fandi Ciptono, dan Anastasia Diana, *Total Quality Management (TQM)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1998), h. 4.

⁶ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu*, <http://www.pdk.go.id> Online, 10 Agustus 2013.

Banjarmasin Selatan dibanding Kecamatan Banjarmasin Tengah, baik ditinjau dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, jumlah rasio siswa dengan jumlah penduduk, kualitas sarana prasarana pendidikan, mutu lulusan, dan lain-lain. Sebagai contoh rasio siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibanding jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah 33,51 yang berarti bahwa hanya 33,51% penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sedangkan sisanya 66,49% bersekolah di SLTA di Kecamatan lain dan/atau tidak melanjutkan ke SLTA. Keadaan ini sangat berbeda jauh dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah yang memiliki rasio siswa SLTA dibanding jumlah penduduk sebesar 144,25.⁷

Banyak faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut, antara lain: layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan, faktor sosial ekonomi masyarakat, faktor geografis dan demografis kecamatan, faktor wilayah tempat bekerja orang tua siswa, dan lain-lain. Untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah ini, diperlukan pemetaan dan Analisis Kualitas Pendidikan Antar Wilayah Kecamatan di Kota Banjarmasin.

Besarnya angka disparitas kualitas pendidikan antar wilayah di Kota Banjarmasin menyebabkan para orang tua rela menyekolahkan anaknya pada sekolah yang jauh dari rumah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada jumlah siswa pada sekolah unggul yang jumlah peminatnya sangat besar, sehingga jumlah siswanya jauh lebih besar dari sekolah yang kualitas layanannya rendah.

⁷ Pemerintah Kota Banjarmasin. 2017. *Data Siswa Menurut Tingkat Per-Kecamatan Tahun 2016-2017*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Hal lain yang juga diasumsikan berpengaruh terhadap jumlah siswa adalah kemudahan akses menuju sekolah, faktor demografis, dan faktor sosial budaya lingkungan sekitar sekolah. Perbedaan jumlah siswa ini menyebabkan perbedaan pada pendapatan sekolah, hal ini dikarenakan sumber pembiayaan di sekolah satu-satunya adalah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Hal ini semakin memperparah keadaan sekolah tersebut, karena biaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang besar tidak sebanding dengan pendapatan sekolah yang hanya mampu untuk membiayai operasional yang bersifat rutin saja.

Karena itu, perlu dilakukan penelitian sebagai upaya mengambil kebijakan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan sebagai upaya mengurangi disparitas kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin, terutama di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin beserta analisisnya?
2. Apa saja faktor-faktor dominan penyebab utama disparitas mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin?
3. Apa saja rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengurangi disparitas mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin?
4. Apa saja rekomendasi kebijakan pemerataan mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin?

Dari fokus rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemetaan mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin beserta analisisnya;
2. Menggali data tentang faktor dominan penyebab utama disparitas mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin;
3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengurangi disparitas mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan pemerataan mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan dalam mengurangi disparitas kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan, atau bidang kajian yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan metode kualitatif digunakan sebab permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan obyek penelitian yang belum jelas dan penuh makna dengan cara yang sistematis, faktual, dan akurat. Data yang muncul yang berwujud *kata-kata* dan bukan rangkaian angka didapatkan dalam beberapa cara, yaitu: observasi, wawancara, intisari dokumen, atau dengan cara lain yang biasanya diproses dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kuantitatif yang ada tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun kedalam tabel dan teks yang diperluas.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, mengangkat permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisis melalui data-data statistik sehingga memerlukan pendekatan tertentu untuk memahaminya. Metode deskriptif kualitatif ini juga bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau fenomena alam lainnya yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas kualitas pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan waktu penelitian dan pengambilan data pada April – Juli 2017. Selama bulan April hingga Juli 2017 aktivitas yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data dengan melaksanakan dokumentasi data dan melakukan wawancara.

Teknik sampling tetap digunakan dalam penelitian ini, mengingat luasnya wilayah penelitian dan banyaknya subjek yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan teknik sampling ini digunakan antara lain untuk: (1) Mengetahui peta mutu pendidikan antar kecamatan dan faktor-faktor dominan penyebab utama disparitas mutu pendidikan di Kota Banjarmasin; (2) Populasi penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Banjarmasin, seperti di wilayah Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Tengah; (3) Pemilihan sampel dilakukan di beberapa sekolah dalam beberapa kecamatan yang berbeda. Ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

- (a) layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan,
- (b) faktor sosial ekonomi masyarakat,
- (c) faktor geografis dan demografis kecamatan,
- (d) faktor wilayah tempat bekerja orang tua siswa,
- (e) kemudahan akses menuju sekolah,
- (f) faktor demografis,
- (g) faktor sosial budaya lingkungan sekitar sekolah.

Data penelitian yang akan digunakan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai dan dengan cara memberi pertanyaan (kuesioner) secara tertulis kepada orang/ sekelompok orang yang dianggap menguasai/ahli dalam bidang tertentu yang dibutuhkan dalam data penelitian. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah: (a) Observasi mengenai potensi lokal yang ada di lingkungan sekolah; (b) Dokumenter berupa kurikulum dan kegiatan-kegiatan sekolah; dan (c) *Focus Group Discussion*.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dapat berupa dokumen, buku, catatan atau data lain yang diperoleh dari instansi yang ada hubungannya dengan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:
 - (a) Potensi Pendidikan di Kota Banjarmasin;
 - (b) Peta Wilayah dan Peta Sebaran Potensi lokal di Kota Banjarmasin;
 - (c) Potensi Kewirausahaan di Kota Banjarmasin;

(d) Potensi Budaya di kota Banjarmasin;

(e) Fenomena lain yang ada di Kota di Kota Banjarmasin.

Setelah data primer dan sekunder diperoleh dari sumbernya, maka tahapan selanjutnya dilakukan pengolahan data, antara lain sebagai berikut:

1. *Editing*: Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dilakukan *editing* untuk meminimalisasi tingkat kesalahan, kekurangan dan kelebihan data yang tidak diperlukan. *Editing* dilakukan pada saat masih di lapangan agar kekurangan data dapat segera dilengkapi.
2. Tabulasi dan Kompilasi data: Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dikelompokkan dan dimasukkan dalam bentuk tabulasi, agar memudahkan dalam analisis. Kompilasi data adalah penyusunan dan pengelompokkan data sesuai dengan variabel yang digunakan.
3. Analisis: Data yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian di analisis dengan menginterpretasikan data melalui informasi sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Analisis data ini digunakan untuk penarikan kesimpulan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif yang menggunakan penuturan, uraian, dan penjelasan berdasarkan data serta informasi yang diperoleh dari hasil survei, kuesioner, dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis sasaran: Upaya Mengurangi Disparitas Kualitas Pendidikan di Kota Banjarmasin.

BAB II

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

A. Peningkatan Mutu Sekolah

1. Pengertian Peningkatan Mutu Sekolah

Perubahan Sistem Pendidikan Nasional dari Undang-Undang Nompr 20 tahun 2003 menjadi Kurikulum 2013 (K-13) merupakan upaya pembaharuan pendidikan kearah peningkatan mutu. Upaya peningkatan mutu pendidikan beralih menjadi tanggung jawab sekolah, dengan pola manajemen berbasis sekolah (MBS) sejalan dengan era otonomi daerah. Model manajemen berbasis sekolah yang dikembangkan di Indonesia adalah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Dengan demikian tidak ada perbedaan antara manajemen berbasis sekolah dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah yang melibatkan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Dalam pada itu, kebijakan nasional yang menjadi prioritas Pemerintah harus dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan,

menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat atau pemerintah (Mulyasa, 2000:25).

2. Tujuan Peningkatan Mutu Sekolah

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan satu upaya pemerintah untuk memandirikan dan memberdayakan institusi sekolah dengan memberikan kewenangan (otonomi) kepada kepala sekolah dan mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Adapun tujuan dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yaitu:

- a. Meningkatkan mutu melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
- c. Meningkatkan tanggungjawab kepala sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya;
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai (Dikmenum 2001: 7).

Dari empat (4) penjelasan tujuan tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada kepala sekolah disertai tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MPMBBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan (guru), sehingga keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme kepala sekolah.

Dengan diberikannya kepala sekolah hak untuk menyusun kurikulum dan program pembelajaran, mengelola tenaga kependidikan, didorong untuk berinovasi dalam melakukan ekperimentasi di lingkungan sekolahnya.

Dengan demikian MPMBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah. Melalui penyusunan kurikulum yang efektif rasa tanggung jawab sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah, prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua.

Secara umum manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Dengan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya sehingga akan lebih mandiri. Dengan kemandiriannya sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Peningkatan rasa memiliki ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan dedikasi (pengabdian) warga sekolah terhadap sekolahnya. Inilah esensi pengambilan partisipatif, baik peningkatan otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipatif tersebut ditujukan untuk peningkatan mutu sekolah berdasarkan kebijakan Pendidikan Nasional. (Dikmenum, 2001: 8).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa esensi dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah adanya otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dalam rangka mencapai sasaran mutu sekolah

3. Indikator Keberhasilan Peningkatan Mutu Sekolah

Keberhasilan peningkatan mutu sekolah pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana sekolah mampu tumbuh dan berkembang dari sekolah oleh sekolah dan untuk sekolah bersama-sama masyarakat yang diindikasikan oleh adanya prestasi sekolah baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Meskipun demikian ada indikator khusus yang dapat dilihat untuk menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan sekolah. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, maka pendekatan sistem merupakan cara yang tepat sebagai pemandu. Dalam pendekatan sistem yaitu melihat dari sisi *input*, proses dan *output*.

Dikdasmen (2000: 16) Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya manusia (kepala sekolah, karyawan, siswa) sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, dana, bahan dan sebagainya). Input perangkat meliputi: Stuktur organisasi sekolah, rencana dan program pendidikan, kurikulum, per undang-undangan/peraturan-peraturan, deskripsi tugas. Input harapan berupa: visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Input merupakan persyaratan bagi berlangsungnya proses. Untuk mengukur tinggi rendahnya mutu input diukur dengan kesiapan input, makin tinggi tingkat kesiapan input makin tinggi mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berhubungan berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan yang berskala *micro* (tingkat sekolah) proses yang dimaksud adalah pengambilan keputusan, proses pengolahan program, proses belajar mengajar memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang nikmat (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar yang benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah, kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/prilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, produktifitas, efisiensi serta inovasinya. Output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu, jika prestasi sekolah, prestasi peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi, seperti prestasi akademik NEM/NUAN, lomba karya ilmiah, lomba bidang studi, berpikir kritis, kreatif, rasional, ilmiah dan penalaran yang baik. Prestasi non akademik, seperti keingin tahuan yang tinggi, kejujuran, kerjasama yang baik, solidaritas yang tinggi, kedisiplinan, kerajinan, olahraga, kesenian, kepramukaan dan sebagainya.

B. Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan/ Sekolah

Dalam dunia pendidikan banyak masalah mutu yang dihadapi, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Beberapa mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para

pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Selanjutnya mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak bisa melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja atau tidak dapat diterima di dunia kerja, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif, dan akan menjadi beban masyarakat menambah biaya hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi tersisih dalam masyarakat. Untuk menguraikan masalah di atas, maka diperlukan upaya untuk membenahi strategi mutu pendidikan. Dan di bawah ini akan diuraikan apa sesungguhnya mutu pendidikan itu dan Total Quality Manajemen (TQM) sebagai konsep peningkatan mutu pendidikan.

1. Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kualitas atau mutu berarti: *Pertama*, ukuran (baik buruk suatu benda); *Kedua* kadar; *Ketiga* taraf atau derajat kepandaian atau kecerdasan.⁸

Kemudian makna kualitas sangat beragam dan keberagaman makna itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dari setiap orang. Juga disebabkan oleh kualitas sendiri yang mempunyai banyak kriteria yang berubah secara terus menerus sehingga orang akan menilai dengan kriteria yang berbeda pula. Menurut Suryobroto, mutu secara umum terkandung maksud derajat

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.677.

keunggulan suatu produk (hasil kerja atau upaya) baik berupa barang atau jasa, baik yang berbentuk (*tangible*) maupun yang tidak berbentuk (*intangible*).⁹

Dalam konteks pendidikan yang mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan dikatakan bermutu terkandung di dalamnya adanya berbagai *input* seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya lain serta terciptanya suasana yang kondusif sedang mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai sekolah pada kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai bisa berupa hasil tes akademis dan non akademis (olah raga, seni atau ketrampilan). Bahkan prestasi sekolah dapat juga berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti suasana disiplin, keakraban, kekeluargaan, saling menghormati, dan suasana kebersihan lingkungan sekolah.

Menurut Depdiknas bahwa secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dan secara khusus mutu dalam konteks pendidikan mencakup mutu *input*, proses dan *output* pendidikan.¹⁰ *Input*, proses, dan *output* pendidikan itu dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumber daya meliputi sumber daya manusia

⁹ Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, ... h. 210.

¹⁰ Depdikbud, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, PLP, 2005), h.6.

(kepala sekolah, guru termasuk guru bimbingan dan konseling (BK), karyawan, siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). *Input* perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Selain itu sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الثَّغْوَانِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Demikian juga dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat: 110.¹²

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (الإعمرن: 110)

Selain dari itu, Hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mutu sebagai berikut:¹³

المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف (رواه البخاري)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Dirjen Bimas Islam: PT Tehazed, 2009), hal. 377.

¹² *Ibid*, h. 80.

¹³ Imam Abi Al-Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Darul Fikri, 1993 M/ 1414 H.), h. 559.

Berdasarkan dari ayat dan hadits di atas, jelas bahwa agama Islam selalu memperhatikan mutu, dan sebenarnya sangat menginginkan umatnya untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi pribadi yang berkualitas hingga terciptanya umat yang bermutu, sehingga untuk menjadi manusia yang bermutu.

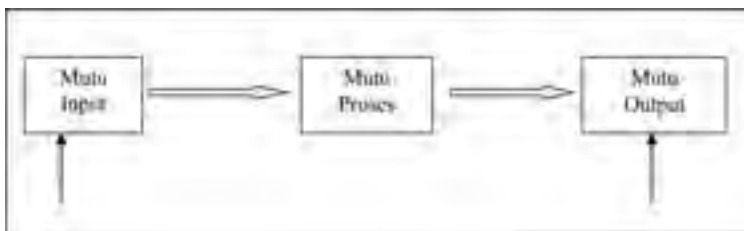
Kesiapan *input* sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Semakin tinggi tingkat kesiapan *input*, maka semakin tinggi pula mutu *input* tersebut. Sedangkan proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input* sedangkan sesuatu dari hasil *proses* disebut *output*. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan *input* sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa pendidik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Sedangkan *output* pendidikan adalah kinerja sekolah, kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah.

Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitas, esensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu *output* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum UAS, UAN, karya ilmiah, lomba akademik, dan prestasi non-akademik, seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penjelasan di atas, mutu pendidikan dapat diilustrasikan berikut ini:



Gambar 2.2: Blok Diagram Ilustrasi Mutu Pendidikan

Gambar blok diagram di atas merupakan ilustrasi mutu pendidikan yang sederhana, sementara dalam pendekatan *Total Quality Strategy* mutu dilihat secara total dari delapan (8) komponen mutu terkait, yaitu: standar proses standar isi,

standar pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Selanjutnya, diutarakan 6 (enam) ide upaya peningkatan mutu pendidikan sebagai berikut:

- a. Komitmen pada perubahan, artinya pemimpin atau kelompok yang ingin meningkatkan mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah;
- b. Peningkatan mutu adalah melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan lebih berbobot;
- c. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Hal ini penting sebab banyak kegagalan dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas;
- d. Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan. Artinya perubahan yang akan dilaksanakan berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi masa depan;
- e. Mempunyai rencana yang jelas. Rencana disusun oleh tim dan dijadikan pedoman dalam proses pelaksanaan program mutu.¹⁴

Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di sekolah, dan semua ini tentu saja memerlukan sumber daya pendidikan termasuk biaya. Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata dkk., *Pengendalian Mutu Pendidikan ...*, h. 8-9.

pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metode (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Strategi kepala sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai *input* tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler baik dalam lingkup subtransi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan akhir semester, UN), dapat pula prestasi dibidang lain seperti prestasi disuatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, mengajak kepedulian.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*ouput*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai *input* dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah

dalam *school based quality improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Untuk mengetahui hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau kognitif dapat dilakukan *benchmarking* (menggunakan titik acuan standar, misalnya: NEM oleh PKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (*benchmarking*) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya.

2. Total Quality Management sebagai Konsep Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Pengertian Manajemen Mutu Terpadu

Manajemen diartikan sebagai strategi kualitas secara total. Di Indonesia dikenal dengan sebutan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) yang merupakan suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis bagi penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan kepuasan pelanggan.¹⁵ Pengertian ini tidak menekankan satu komponen dalam sistem pendidikan, tetapi menyangkut seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu *input*, proses, dan *output* dan semua perangkat yang mendukungnya.

Menurut Tenner & De Toro (1992) yang dikutip Ibrahim Bafadal bahwa Total Quality Management memandang strategi mutu terpadu merupakan proses peningkatan mutu secara utuh,

¹⁵ Edwards Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, cet. IV, (Yogyakarta: IRCisoD, 2006), h. 83-86.

dan bila prosesnya dilakukan secara mandiri maka strategi mutu terpadu terdiri dari tiga tahap peningkatan mutu secara kontinu, yaitu: *Pertama*, perhatian penuh kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal; *Kedua* pembinaan proses; dan *Ketiga*, keterlibatan secara total.¹⁶

Kebutuhan terhadap kualitas pendidikan merupakan syarat penting bagi sekolah untuk memuaskan pelanggan, yang dimaksud pelanggan Sekolah adalah *Pertama*, peserta didik yang memperoleh pelajaran; *Kedua*, orang tua peserta didik yang membayar baik langsung maupun tidak langsung untuk membiayai anak-anaknya; *Ketiga*, pendidikan lanjut atau institusi pendidikan tempat peserta didik melanjutkan studi; *Keempat*, para pemakai tenaga kerja yang perlu untuk merekrut staf trampil, memiliki keahlian dan berpendidikan sesuai dengan kebutuhan; dan *Kelima*, negara yang memerlukan pegawai terdidik dengan baik.¹⁷

Buku Panduan Manajemen Sekolah dijelaskan bahwa ada dua pelanggan yang harus dilayani sekolah, yakni pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Yang dimaksud pelanggan *internal* yaitu kepala sekolah, guru, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi (pengelola lembaga pendidikan). Sedangkan pelanggan *eksternal* terdiri dari pelanggan primer yaitu siswa pelanggan sekunder yaitu orang tua, pemerintah dan masyarakat, pelanggan tersier yaitu pemakai atau penerima lulusan (Perguruan Tinggi dan dunia usaha).¹⁸

¹⁶ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 2006), h. 91.

¹⁷ Greenwood, *Total Quality Management for School*, (London: 1994), h. 27.

¹⁸ Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat SLTP, 2000), h. 192.

Harapan masing-masing pelanggan tersebut terhadap sekolah pasti berbeda, dan sangat tidak mungkin sekolah dapat memenuhi seluruh permintaan pelanggannya. Kendati demikian, semua harapan bisa di rekonsiliasikan, sehingga dapat menampung seluruh aspirasi, walaupun tidak dapat memberi kepuasan secara penuh, dan inilah problem *Total Quality Management* yang mengusung konsep kepuasan. *Total Quality Management* tidak berbicara kualitas absolut, tetapi kualitas relatif yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan terus ditingkatkan setiap saat.

Kemudian ada empat hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total yaitu: *Pertama*, perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu; *Kedua*, kualitas atau mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah; *Ketiga*, prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan; *Keempat*, sekolah harus menghasilkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional.

Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya peserta didik. Jadi sekolah harus mengontrol semua sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu. khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan-tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.

Di era global persaingan semakin ketat. Pendidikan pada masa lalu hanya bersaing pada tingkat regional dan nasional, pada masa sekarang harus bersaing menghadapi kompetisi global. Dalam kondisi seperti ini, maka lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan kualitas *output* yang sesuai dengan tuntutan pelanggan saja yang dapat memenangkan persaingan. Untuk mengetahui makna *Total Quality Management* maka ada beberapa definisi *Total Quality Management* diantaranya: pertama menurut Sallis: '*Total Quality Management is a philosophy of continuous improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customers needs, wants, and expectation*', TQM adalah filosofi kemajuan yang sekurang-kurangnya tiga faktor utama yaitu: (1) Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) Mutu proses belajar mengajar yang mendorong pendidik belajar efektif; dan (3) Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap ketrampilan, dan nilai-nilai.

Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di sekolah, dan semua ini tentu saja memerlukan sumber daya pendidikan termasuk biaya.

b. Konsep Peningkatan Mutu *Total Quality Management* dalam Pendidikan

Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan *Total Quality Management in Education*, sebagai Strategi Mutu Terpadu Pendidikan, yaitu: suatu pendekatan strategi yang memusatkan perhatian mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan itu antara lain, Pertama: peserta didik yaitu kesiapan

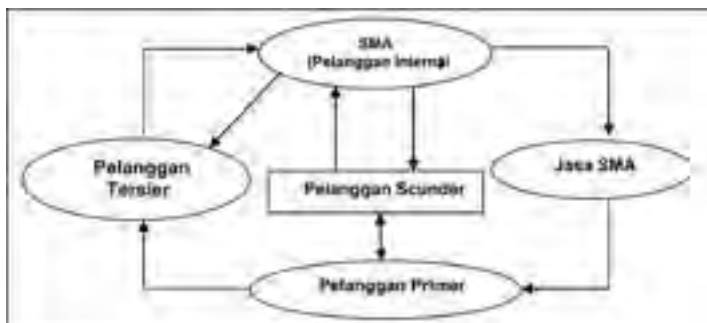
motivasi belajarnya; Kedua, guru yaitu kemampuan profesional, moral kerjanya, kemampuan personalnya, dan kerjasamanya (kemampuan sosial); Ketiga, Kurikulum yaitu relevansinya dengan konten dan oprasionalisasi proses pembelajarannya; Keempat dana, sarana dan prasarana yaitu kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran; Kelima, masyarakat (orang tua, pengguna lulusan dan SMA serta Perguruan tinggi yaitu partisipasinya dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah. Dan lima komponen mutu inilah yang menjadi fokus perhatian kepala sekolah.¹⁹

Edward Sallis mendefinisikan *Total Quality Management in Education* yang maksudnya sebagai cara mengelola lembaga pendidikan-berdasarkan filosofi bahwa meningkatkan mutu harus diadakan dan dilakukan oleh semua unsur lembaga sejak dini secara terpadu berkesinambungan sehingga pendidikan sebagai jasa yang berupa proses pembudayaan sesuai dengan dan bahkan melebihi kebutuhan para pelanggan baik masa kini maupun yang akan datang.²⁰

Hubungan antara pelanggan-pelanggan tersebut tampak seperti pada gambar diagram di bawah ini:

¹⁹ Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama, 2000), h. 25.

²⁰ Edward Sallis, *Total Quality Management (TQM) in Education Strategi Mutu Pendidikan*, Terjemahan: Akhmad Ali Riyadi & Fakrul Rozi (Yogyakarta: IRCiSoD Cet. IV, 2006), h. 73.



Gambar 2.3 Blok Diagram Hubungan antara Pelanggan-Pelanggan dalam Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kemudian dalam Total Quality Management (TQM) keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mapu memberikan produk sama atau melebihi harapan pelanggan. Dilihat jenis pelanggannya, maka sekolah dikatakan berhasil jika:

1. Peserta didik puas dengan produk sekolah, antara lain puas dengan pelajaran yang diterima, puas dengan perlakuan oleh guru maupun pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah. Sehingga peserta didik menikmati situasi sekolah;
2. Orang tua peserta didik puas dengan produk terhadap anaknya maupun produk kepada orang tua, misalnya puas karena menerima laporan periodik tentang perkembangan peserta didik maupun program-program sekolah;
3. Pihak pemakai atau penerima lulusan (perguruan tinggi, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas sesuai harapan;

4. Guru dan karyawan puas dengan produk sekolah, misalnya pembagian kerja, hubungan antar guru atau karyawan atau pimpinan, gaji atau honorarium, dan sebagainya.²¹

Selanjutnya ada lima dimensi pokok yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan,²² atau lima layanan yang harus diwujudkan oleh lembaga pendidikan (SLTA) agar para pelanggan puas, yakni:

1. Keandalan atau keterpercayaan (*reliability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan. Misalnya pengembangan bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan; jadwal pembelajaran dan ujian yang akurat; pembelajaran yang berlangsung lancar; bimbingan yang lancar dan cepat; kepastian studi lanjut tenaga kependidikan yang terencana dan terlaksana dengan baik; dana penelitian tenaga kependidikan, dan kegiatan peserta didik dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Daya tangkap (*responsiveness*), artinya kemampuan para tenaga kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Dengan demikian, kepala sekolah harus mudah ditemui; guru juga gampang ditemui peserta didik untuk keperluan konsultasi. Proses pembelajaran hendaknya diusahakan interaktif dan memungkinkan para peserta didik mengembangkan seluruh kapasitas, kreatifitas, dan kapabilitasnya; fasilitas pelayanan yang ada (perpustakaan, komputer, laboratorium, dan ruang

²¹ Depdikbud, *Paduan Manajemen Sekolah* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Depdikdasmen Direktorat SLTP, 2000), h. 192-193.

²² *Ibid.*, E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional*,..., h. 227-228.

olah raga) harus mudah diakses oleh setiap insan sekolah. Prosedur administrasi penerimaan pendidik baru harus sederhana, tidak birokratis atau berbelit-belit. Dalam hal terjadi salah pelayanan untuk melakukan perbaikan secara tepat dan professional bisa menciptakan persepsi kualitas yang sangat positif. Seperti contoh, jika ada komputer yang rusak di lab komputer, harus segera diambil tindak lanjut, yaitu menginformasikannya kepada peserta didik dan segera memperbaikinya;

3. Jaminan (*assurance*) yang mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap pelanggan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para tenaga kependidikan; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Seperti contoh, seluruh tenaga kependidikan harus benar-benar kompetensi dibidangnya; reputasi penyelenggara pendidikan yang positif dimata masyarakat; sikap dan prilaku seluruh tenaga kependidikan mencenninkan profesionalisme dan kesopanan;
4. Perhatian (*empaty*), yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Misalnya, guru mengenal nama para peserta didik yang menempuh mata pelajaran yang dia ajar; wali kelas bisa benar-benar berperan sesuai fungsinya; setiap guru bisa dihubungi dengan mudah, baik diruang kerja, via telpon, maupun e-mail.
5. Bukti langsung atau penampilan (*tangible*), meliputi fasilitas fisik perlengkapan, tenaga kependidikan, sarana komunikasi. Misalnya berupa gedung, fasilitas komputer fasilitas perpustakaan, fasilita smasjid , mug kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang seminar atau aula, media pembelajaran, kantin tempat parkir, jurnal ilmiah sekolah,

fasilitas olah raga, laboratorium, penampilan dan busana tenaga kependidikan.

Selanjutnya komponen-komponen peningkatan mutu pendidikan dalam Perspektif *Total Quality Management* (TQM) antara lain: (1) Peningkatan Mutu Standar Isi, (2) Peningkatan Mutu Standar Proses Pembelajaran, (3) Peningkatan Mutu Standar Kompetensi lulusan, (4) Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana, (6) Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan, (7) Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan, dan (8) Peningkatan Mutu Standar Penilaian Pendidikan.²³

Adapun penjelasan dari 8 (delapan) standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mutu pada Standar Isi

Peningkatan mutu pada Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.²⁴ Lebih lanjut, aspek sumber daya lain yang mendukung keberhasilan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu adalah menyangkut kurikulum yang meliputi:

- (a) Struktur Kurikulum;
- (b) Kurikulum Muatan Lokal;
- (c) Pengembangan Diri;
- (d) Materi Pengajaran;

²³ Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 (Jakarta: Dirjen Pendidikan, 2007). h. 141-142.

²⁴ *Ibid.*, h. 150.

- (e) Strategi Belajar Mengajar;
- (f) Organisasi;
- (g) Pembiayaan;
- (h) Daya Tampung;
- (i) Pakaian peserta didik.²⁵

Adapun kerangka dasar dan Struktur Kurikulum yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 bahwa:

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidik umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
 - a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Kelompok mata pelajaran kewarnegaraan dan kepribadian;
 - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus.²⁶

²⁵ Aan Komariah & Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, ...* h. 8.

²⁶ Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 (Jakarta: Dirjen Pend., 2007). hal. 143.

2. Mutu pada Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.²⁷ Peningkatan mutu dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai keunggulan proses pembelajaran dan pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang mengutamakan hasil dan memberi peluang tinggi bagi guru dan peserta didik untuk aktif, inovatif pemanfaatan sarana dan prasana yang banyak dan bagus. Dan ada beberapa kriteria pembelajaran yang unggul (bermutu), yaitu: *Pertama*, tingkatkan peranan peserta didik; *Kedua*, kembangkan bahan ajar; *Ketiga*, pemanfaatan sumber belajar; *Keempat*, tugas dan fungsi guru; *Kelima*, metode yang tepat; *Keenam*, keseimbangan jasmani dan rohani; *Ketujuh*, mengerti bukan menghafal; dan *Kedelapan*, sumber belajar.²⁸

Kemudian peningkatan mutu pendidikan dalam perspektif *Total Quality Management* bertujuan untuk memiliki relevansi dalam pendidikan, maka ia harus memberi penekanan pada mutu peserta didik. Itu tidak akan terwujud jika TQM tidak memberi kontribusi yang substansial bagi mutu dalam pendidikan. Pada saat sebagian besar institusi pendidikan dituntut untuk mengerjakan lebih baik lagi, penting baginya untuk memfokuskan diri pada aktifitas utama pembelajaran. Selanjutnya menurut Ibrahim Bafadal proses pembelajaran unggulan (bermutu) adalah: Proses belajar mengajar yang dikembangkan dalam rangka membelajarkan semua siswa berdasarkan perbedaan tingkat keunggulannya

²⁷ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, ...h. 150.

²⁸ Syafaruddin, Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 152-153.

(*individual awarness*), untuk menjadikan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri namun tetap dalam kebersamaan mampu menghasilkan karya yang terbaik dalam menghadapi persaingan bebas dunia.²⁹

Berdasarkan konsepsi di atas, bahwa pembelajaran yang bermutu bukanlah pembelajaran yang secara khusus dirancang dan dikembangkan hanya untuk siswa yang unggul saja, melainkan lebih merupakan pembelajaran yang secara metodologis maupun psikologis dapat membuat semua peserta didik mengalami belajar secara maksimal dengan memperhatikan kapasitasnya masing-masing. Dan ada tiga indikator proses pembelajaran bermutu, yaitu: Pertama, proses pembelajaran yang dapat melayani semua peserta didik bukan hanya pada sebagian pendidik; Kedua, semua pendidik mendapatkan pengalaman belajar semaksimal mungkin; Ketiga, walaupun semua peserta didik mendapatkan pengalaman belajar maksimal, prosesnya sangat bervariasi bergantung pada tingkat kemampuan pendidik yang bersangkutan.

Semua peserta didik berbeda satu sama lainnya, dan mereka belajar dengan model yang cocok dengan kebutuhan dan kecenderungan mereka masing-masing. Institusi pendidikan yang menggunakan prosedur mutu terpadu harus menangkap secara serius isu-isu tentang gaya dan kebutuhan pembelajaran untuk menciptakan strategi individualisasi dan diferensiasi dalam pembelajaran. Peserta didik adalah pelanggan utama, dan jika model pembelajaran tidak memenuhi kebutuhan individu masing-masing mereka, maka itu berani bahwa institusi tersebut tidak dapat mengklaim bahwa ia telah mencapai mutu terpadu.

²⁹ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu....*h. 30.

Institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk membuat peserta didik sadar terhadap variasi metode pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Institusi pendidikan harus memberi peserta didik kesempatan untuk mencontoh pembelajaran dalam variasi model yang berbeda. Institusi harus memahami bahwa beberapa pendidik juga suka pada kombinasi beberapa gaya belajar dan institusi harus mencoba untuk cukup fleksibel dalam memberikan pilihan tersebut. Miller, Dower dan Inniss bersepakat dalam buku mereka, *Improving Quality in Further Education*. Argumen mereka, yang berlaku terhadap berbagai bentuk institusi, menegaskan bahwa institusi harus memberikan beberapa model pengajaran dan pembelajaran terhadap para peserta didik, sehingga mereka memilih kesempatan untuk meraih sukses secara maksimal.

Proses negosiasi mungkin memerlukan pembentukan sebuah forum yang memberikan umpan balik serta kesempatan kepada para peserta didik agar mereka dapat mengatur sendiri pembelajaran mereka. Orang tua atau sponsor kerja dapat menjadi representasi yang baik bagi forum tersebut. Pengawasan yang detail harus dilakukan baik oleh para guru maupun peserta didik, untuk memastikan bahwa semua sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Proses pembelajaran di sekolah bersifat formal, disengaja, direncanakan dengan bimbingan guru, serta pendidik lainnya. Apa yang akan dicapai dan dikuasai pendidik (tujuan belajar), bahan apa yang harus dididikan (bahan ajar), bagaimana cara peserta didik memperoleh bahan ajar (metode pembelajaran), dan bagaimana cara mengetahui kemajuan belajar peserta didik (evaluasi), telah direncanakan dengan cara seksama dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya nya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

Nasional pada pasal 19-24 dijelaskan bahwa yang dimaksud standar proses pembelajaran adalah: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.³⁰

Kemudian proses pembelajaran tersebut sangat diperlukan, mengingat semakin banyaknya dan semakin tingginya tuntutan kehidupan masyarakat. Semakin tinggi taraf perkembangan masyarakat, semakin tinggi dan banyak tuntutan yang harus dipenuhi mulai dari Taman kanak-kanak, SD, SMA, SMA/SMK, Pendidikan Tinggi bahkan sampai pascasarjana disediakan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Ada dua pendekatan di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, yaitu *Pertama*; pendekatan yang mengutamakan hasil belajar yang bertolak dari teori Psikologi Daya, Herbat, dan Behaviorisme (*conectionisme, conditioning, dan operant conditioning*) yang menekankan pada cara pengulangan dan pembiasaan; *Kedua*; pendekatan yang mengutamakan proses belajar yang bertolak dari teori *Naturalisme-Romanlisisme* dan teori *Kognitif-Gestalt*. *Naturalisme-Romantisisme* menekankan kepada aktivitas peserta didik, sedang *Kognitif-Gestalt* menekankan pemahaman dan kesatupaduan yang menyeluruh. Dalam proses pembelajaran yang menekankan proses sekarang dikenal pula sebagai ketrampilan proses, guru menciptakan bentuk kegiatan pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik terlibat dalam berbagai pengalaman. Peserta didik diminta untuk

³⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 th 2005, ..., h. 165.

merencanakan, melaksanakan dan menilai sendiri suatu kegiatan. Pendidik melakukan percobaan, pengawasan, pengukuran, perhitungan dan membuat penyimpulan-penyimpulan sendiri.

Proses pembelajaran merupakan suatu upaya pengembangan seluruh kepribadian individu, baik segi fisik maupun psikis. Dalam proses belajar di sekolah sasaran belajar sering dirumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih luas yaitu tujuan kurikuler, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan institusional atau tujuan suatu lembaga pendidikan.

3. Mutu pada Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.³¹ Dalam hal tersebut pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.³² Adapun tahapan-tahapan sekolah dalam mencapai standar kompetensi lulusan dirinci dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut adalah: Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA):

- tahun I : kelas 1
- tahun II : kelas 1 dan 2
- tahun III : kelas 1, 2, dan 3.³³

³¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 th 2005,..., h. 150.

³² *Ibid.*, h. 167.

³³ Masnur Muslih, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual (Seri Standar Nasional Pendidikan) Cet. I.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.14-15.

Dilihat ciri-ciri kompetensi lulusan (sikap, pengetahuan, keterampilan) lulusan SMA pada buku *Himpunan Permendiknas Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* oleh Afnil Guza. Berdasarkan isi yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas mulai tahun ajaran 2006 semua tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah harus mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis standar isi dan kompetensi yang telah diterapkan pemerintah secara kreatif dan sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan panduan yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).³⁴

Selanjutnya dalam peningkatan mutu standar kelulusan tidak lepas pelayanan pendidikan (sekolah) yang mengacu pada standar pelayanan minimal pendidikan (sekolah) meliputi standar pelayanan minimal kurikulum, standar pelayanan minimal guru/tenaga pengajar, maupun standar pelayanan minimal sarana dan prasarana serta yang lainnya. Untuk standar pelayanan minimal pendidikan bidang kurikulum, hendaknya dapat ditentukan bagaimana standar minimal kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Lalu standar minimal seorang guru, misalnya untuk pendidikan TK/SD, seorang guru minimal berpendidikan D2 atau setingkat PGSD, SMA sekarang guru minimal berpendidikan S-1, demikian juga dengan yang lainnya. Para guru juga harus mengajar sesuai dengan kompetensinya.

Layanan lain yang tak kalah penting adalah layanan terhadap sumber daya manusia yang memproses *raw input* (pendidik) sehingga *out put* pendidikan bermutu, yaitu pelayanan terhadap seluruh guru dan karyawan mulai dari pembagian kerja yang jelas, suasana yang kondusif dalam pengembangan intelektual, gaji bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, dan

³⁴ *Ibid*, h. 15.

insentif lain serta kesejahteraan lain berupa santunan ketika sakit, santunan kematian, santunan ketika pernikahan, khitanan dan pindah rumah, dan arisan keluarga.

4. Mutu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.³⁵ Dalam BAB VI Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 28 ayat 1, 2 bahwa standar Pendidik adalah:

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 4 dinyatakan bahwa Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1); (2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (3) Sertifikat guru untuk SMA/MA.³⁷

³⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 th 2005,..., h. 151.

³⁶ *Ibid*, h. 168.

³⁷ *Ibid*, h. 170.

Adapun peningkatan mutu standar tenaga kependidikan pada sekolah SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.³⁸

Untuk ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan sebagaimana tersebut dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Kemudian peningkatan mutu dengan standar tenaga kependidikan tidak lepas dari layanan administrasinya yang efisien dan efektif cepat, tepat dan akurat, para pegawai yang berada di *front line*-nya bisa menghadapi pelanggan dengan ramah. Kemudian para guru mengajar dengan persiapan yang baik, memperhatikan keragaman siswa, bersikap demokratis dalam pengembangan strategi, tidak membiarkan ada anak yang tertinggal, sehingga *end-product* dari mata pelajarannya memiliki kompetensi penguasaan yang baik. Demikian juga dengan kepala sekolahnya selain dinamis, progresif dia juga aspiratif, terbuka dengan saran-saran kemajuan, dan mampu mengkomunikasikan gagasan dan berbagai persoalan sekolahnya itu dengan komite sekolah, untuk disampaikan kepada pelanggan yang lebih luas, serta kelompok peduli sekolah dan masyarakat lingkungannya.

Dalam hal peningkatan mutu tersebut Manajemen Sumber Daya Manusia juga penting, yang merupakan suatu pendekatan terhadap manajemen manusia, yang berdasarkan empat prinsip dasar yaitu: *Pertama*, sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi (lembaga pendidikan); *Kedua*, manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi (lembaga pendidikan) tersebut; *Ketiga*,

³⁸ *Ibid*, h. 173.

keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari lembaga pendidikan tersebut saling berhubungan, dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan lembaga pendidikan dan perencanaan strategis. *Keempat*; Kultur dan nilai suatu perusahaan, suasana organisasi (lembaga pendidikan), dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Akhirnya manajemen SDM berhubungan dengan integrasi menjadikan semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.³⁹

Selanjutnya, sumber daya manusia yang terdapat dalam lembaga pendidikan. Menurut Faustino Cardoso Gomes, secara umum sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi/ lembaga pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: (1) sumber daya manusia (*human resources*); (2) sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Yang termasuk dalam kelompok sumber daya non-manusia ini antara lain modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain.⁴⁰ Sumber daya manusia yang bermutu dalam mengelola lembaga pendidikan menurut Muchtar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Kuat aqidah, ibadah dan mu'amalahnya;
- (2) Menguasai seluk beluk pendidikan;

³⁹ Michail Armsrong, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia 1987), h.1.

⁴⁰ Faustino Cardoso Gomes, *Managemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Cet.II, Andi Offset, 2003), h. 1.

- (3) Menguasai dan menerapkan manajemen yang baik, sehat, dan terbuka;
- (4) Berakhlakul karimah;
- (5) Melaksanakan tugas dengan profesional;
- (6) Fokus pada tugas dan jabatan yang diemban usahakan tidak merangkap jabatan;
- (7) Tidak semata-mata mencari keuntungan materi, tapi ditekankan pada ibadah dan ikhlas karena Allah;
- (8) Menjalin hubungan yang baik dan harmonis secara internal maupun eksternal;
- (9) Kuat dan potensial dalam bidang SDM, manajemen, pembiayaan, sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikannya.⁴¹

Pendapat lain mengatakan bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak lepas dari sumber daya manusia yang terlibat di lembaga pendidikan (Sekolah Menengah Atas) sebagai komponen peningkatan mutu sekolah harus memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut: (1) Kepala Sekolah, (2) Wakil Kepala Sekolah, (3) Staf Pimpinan, (4) Guru, (5) Kepala Tata Usaha, (6) Peserta Didik, (7) Peran Serta Masyarakat⁴²

Kemudian layanan terhadap sumber daya manusia yang memproses *raw input* (pendidik) sehingga *out put* pendidikan bermutu, yaitu pelayanan terhadap seluruh guru dan karyawan

⁴¹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet. I, 2005), h. 137.

⁴² Aan Komariah & Cipi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 2006), h.6.

mulai dari pembagian kerja yang jelas, suasana yang kondusif dalam pengembangan intelektual, gaji bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, dan insentif lain serta kesejahteraan lain berupa santunan ketika sakit, santunan kematian, santunan ketika pernikahan, khitanan dan pindah rumah, dan arisan keluarga. Dari beberapa komponen tersebut apabila terpenuhi sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, perlu peningkatan pendidikan melalui sumber daya manusianya.

5. Mutu pada Standar Sarana dan Prasarana

Adapun Standar Sarana Prasarana dalam peningkatan mutu pendidikan seperti yang dimaksud oleh Kementerian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.⁴³

Masih mengenai sarana dan prasarana pendidikan secara tegas dinyatakan wajib adanya macam sarana dengan rincian sebagai berikut: (1) wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (2) wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan

⁴³ Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), h. 85-86.

jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁴⁴ Sedangkan standar sarana dan prasarana ditetapkan sebagai berikut: (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium computer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia; (2) Standar jumlah peralatan tersebut pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik; (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan; (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah tek pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik; (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri; (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.⁴⁵

Untuk standar sarana dan prasarana pelayanan minimal bidang sarana dan prasarana pendidikan sekolah hendaknya tak memaksakan anak didik untuk masuk dalam satu ruangan kelas melebihi kapasitas yang ada. “Standar minimal satu kelas diisi 25 siswa, dan maksimal 40 siswa. Lebih dari itu, sistem belajar mengajar sudah sangat tidak kondusif.

⁴⁴ *Ibid*, h. 85-86.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 th 2005, ..., h. 178-179.

Pelayanan sekolah dalam konteks peningkatan mutu sarana dan prasarana di dukung oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan, Muhammad Said mendefinisikan lingkungan adalah: Segala pengaruh langsung atau tidak langsung yang bekerja pada manusia dari luar serta meliputi isinya yang dihayati dan yang tak kentara dari ruangan, iklim dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Mahfud Shalahudin bahwa lingkungan adalah segala Sesuatu yang melingkupi dan mengelilingi sepanjang hidupnya.⁴⁶ Selanjutnya, proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, social intelektual, dan nilai-nilai. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia, yang merupakan tempat dan sekaligus memberikan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan bagi berlangsungnya proses pendidikan di sekolah.

Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antara pendidik dengan pendidik serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Interaksi pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan corak pergaulan antar orang-orang yang terlibat dalam interaksi tersebut, baik pihak peserta didik maupun para pendidik dan pihak lainnya. Corak pergaulan yang keras akan memberikan warna keras pada sifat-sifat pribadi pendidik sebaliknya corak pergaulan yang bersahabat atau islami akan memberikan warna sifat-sifat pribadi; yang bersahabat atau Islami juga. Lingkungan intelektual merupakan kondisi alam iklim sekitar yang mendorong dan menunjang pengembangan kemampuan

⁴⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan.....*,h.5.

berpikir. Lingkungan ini mencakup perangkat lunak seperti sistem dan program-program pengajaran, perangkat keras seperti media dan sumberbelajar, serta aktivitas-aktivitas pengembangan dan penerapan kemampuan berpikir. Lingkungan lainnya adalah lingkungan nilai, yang merupakan tata kehidupan nilai, baik nilai kemasyarakatan, ekonomi, social, politik, estetika, etika maupun nilai keagamaan yang hidup dan dianut dalam suatu daerah atau kelompok tertentu.

Lingkungan-lingkungan tersebut akan membebankan pengaruh yang cukup besar terhadap proses dan hasil dari pendidikan. Disamping itu interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta lingkungan kerja. Menurut Hadari Nawawi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan kerja antara lain: (1) Faktor fisik material, seperti luas ruangan, kebersihan penerangan, suhu udara, kelembaban, ventilasi ruang kerja dan peralatan kerja; (2) Faktor kimiawi seperti gas, uap, debu, dan lain-lain; (3) Faktor biologis, yang terdapat dilingkungan kerja karena kehadiran makhluk organik, terutama manusia dan makhluk hidup lainnya, yang menciptakan kesegaran dan kenyamanan dalam bekerja atau sebaliknya; (4) Faktor fisiologis, adalah kondisi lingkungan dan peralatan kerja yang berhubungan dengan postur tubuh, stamina atau daya tahan, konsentrasi, kelelahan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan peralatan dan lain-lain dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari; dan (5) Faktor psikis atau mental, adalah iklim atau suasana kerja yang tenang, menyenangkan atau sebaliknya, yang bersumber dari interaksi antara sesama pegawai/karyawan sebagai manusia atau makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, sesuai dengan posisi masing-masing.

Misalnya hubungan antara pegawai/karyawan dengan atasannya yang bebas dari tekanan atau antar sesama pegawai/karyawan yang diliputi saling pengertian, penerimaan dan harga menghargai, hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan, kepuasan kerja karena faktor upah dan perlakuan secara manusiawi, kesempatan mengembangkan diri, keterbukaan dalam pembinaan dan pengembangan karier dan lain-lain.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu standar sarana dan prasarana yang di dukung oleh lingkungan pendidikan yang bermutu adalah saling mempengaruhi secara fisik yakni bersih indah, aman, damai, asri dan secara sosial terbangun interaksi yang saling mendukung untuk memotivasi belajar peserta didik dan motivasi para pendidik untuk melaksanakan tugasnya dengan bersemangat dan ceria dalam kerja, kemudian secara intelektual terbangun interaksi keilmuan yang baik antara pimpinan sekolah, guru, dan karyawan, serta pendidik sehingga terbangun masyarakat pembelajar, dan yang terakhir secara nilai terbangun nilai-nilai yang baik yaitu moralitas pimpinan, guru, karyawan, dan peserta didik semakin baik ditengah masyarakatnya.

6. Mutu pada Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan tercantum dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, maka dijelaskan tentang pengertian standar pengelolaan adalah: Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan

pendidikan, kabupaten/kota/provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.⁴⁷

Selanjutnya tercantum dalam pasal 49 ayat (1) dan pasal 50 ayat (3) yang antara lain menyatakan dalam 2 (dua) di bawah ini bahwa: (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas; (2) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.⁴⁸

Dalam peningkatan mutu standar pengelolaan tidak lepas dengan *Total Quality Management* (TQM), adalah semua perangkat sekolah dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan tenaga kebersihan serta keamanan, harus benar-benar memiliki kultur pelayanan terbaik terhadap peserta didik dan orang tua siswa, sehingga mereka puas, tidak saja diakhir setelah putra-putrinya lulus, tetapi sejak awal mereka masuk ke halaman sekolah, merasa nyaman, aman, terlindungi, terhargai, dan terlayani oleh sekolah yang berada di *front line*.

Menurut Edward Sallis Total Quality Management adalah merupakan sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para pelanggannya saat

⁴⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan, ...*, h. 150.

⁴⁸ *Ibid*, h. 181-182.

ini dan untuk masa yang akan datang.⁴⁹ Untuk menjamin keberhasilan penerapan TQM, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan berdisiplin, yaitu: (1) menanamkan falsafah mutu ke seluruh jajaran organisasi; (2) mempersiapkan kepemimpinan yang berwawasan mutu; (3) melakukan perubahan atau modifikasi atas sistem mutu yang ada; dan (4) melatih dan memberdayakan karyawan, dan empat langkah ini harus dilakukan dengan benar sejak awal, sesuai dengan motto dalam mutu “*do it right the first time*”. Menurut Direktorat TK dan SD (1997) ada 5 komponen yang menentukan mutu pendidikan yaitu: Pertama, kegiatan belajar mengajar; Kedua, manajemen pendidikan yang efektif dan efisien; Ketiga, buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai; dan Keempat, fisik dan penampilan sekolah yang baik; Kelima partisipasi aktif masyarakat.⁵⁰

Ada beberapa prinsip *Total Quality Management in Education*. Adapun prinsip-prinsip itu antara lain: Pertama, *Quality First* yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan yaitu mulai dari diknas, yayasan, pengawas, kepala sekolah, guru, karyawan, penjaga, petugas kebersihan dan peserta didik harus memprioritaskan mutu. Yaitu mutu produk, jasa, mutu pelanggan dan mutu pembelajaran; Kedua, *Stakeholder-in* yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*. Kebutuhan terhadap kualitas pendidikan merupakan syarat penting bagi sekolah untuk memuaskan pelanggan. Ketiga, *The Next process in our stakeholder* yaitu setiap orang yang melaksanakan tugas

⁴⁹ Sallis, Edward, *Total Quality Management (TQM) in Education...*, hal. 73.

⁵⁰ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu*, h.20.

dalam proses pendidikan, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder-nya* yang harus dipuaskan; Keempat, *Speak with data* yaitu setiap pelaksana pendidikan harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa. Artinya semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada dalam lembaga pendidikan dengan konsep kerjakan apa yang anda tulis dan dokumentasikan apa yang anda kerjakan; *Kelima Upstream manajemen* yaitu semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan dilakukan secara partisipasi bukan otoritatif. Artinya seluruh *stakeholder* dimintai usulan atau ide pemikiran dalam mengambil keputusan. Sehingga hasil keputusan yang ditetapkan menjadi keputusan yang solid dan secara individual bertanggung jawab atas keputusan bersama.

Edward Sallis membagi pelanggan menjadi tiga kategori yaitu pelanggan primer, pelanggan skunder, dan pelanggan tersier, dari tiga hal tersebut adalah sebagai berikut: Pelanggan primer adalah pendidik yang memperoleh langsung berupa pembelajaran dari sekolah, pelanggan skunder adalah orang tua siswa, pemerintah yang menyediakan anggaran untuk sekolah, serta employer yang membayarkan uang sekolah untuk orang-orang yang diutusnya belajar. Terakhir pelanggan *tersier* yakni pemerintah sebagai institusi yang membutuhkan tenaga kerja, *employer* yang akan menampung para lulusan sekolah di pendidikan atau unit-unit produk jasa, dan masyarakat secara keseluruhan, yang senantiasa membutuhkan pendidikan untuk menyiapkan anak didik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁵¹

⁵¹ Sallis, Edward, *Total Quality Management (TQM)*..., hal. 31.

Dede Rosyada membagi pelanggan sekolah menjadi lima yaitu: (1) Peserta didik yang memperoleh pendidikan; (2) Orang tua peserta didik yang membayar baik langsung maupun tidak langsung untuk membiayai anak-anaknya; (3) Pendidikan lanjut atau institusi pendidikan tempat peserta didik melanjutkan studi; (4) Para pemakai tenaga kerja yang perlu untuk merekrut staf terampil, memiliki keahlian dan berpendidikan sesuai dengan kebutuhan; (5) Negara yang memerlukan pegawai terdidik dengan baik.⁵²

Sementara itu menurut Depdiknas prinsip dasar dari *Total Quality Management* dalam pendidikan adalah sekolah dianggap sebagai suatu unit produksi, di mana peserta didik sebagai bahan mentah dan lulusan sekolah sebagai hasil produksi. Dalam *Total Quality Management* sekolah dipahami sebagai unit produk jasa, yakni produk pembelajaran. Sebagai unit produk jasa, maka yang dilayani sekolah (pelanggan sekolah) adalah: (1) Pelanggan internal: guru, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi, (2) Pelanggan eksternal terdiri atas: pelanggan primer (siswa), pelanggan sekunder (orang tua, pemerintah dan masyarakat), pelanggan tersier (pemakai/penerima lulusan baik diperguruan tinggi maupun di dunia usaha). Dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan tersebut, ternyata ada kesamaan dalam hal mengelola institusi pendidikan yaitu bagaikan suatu usaha yang memerlukan pelanggan apabila dikaitkan dengan sekolah, maka sekolah itu pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan dan dari pihak luar orang tua siswa dan pemerintah dan masyarakat.

⁵² Edward Sallis, *Total Quality Manajement (TQM)*..., hal. 31.

7. Peningkatan Mutu pada Standar Pembiayaan.

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.⁵³ Sesuai dengan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pembiayaan sebagai berikut: (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; (3) Biaya personal sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk biaya mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya; (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan BSNP.⁵⁴

Dalam hal ini Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya.⁵⁵

⁵³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, ..., h. 151.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 th 2005, ..., h. 190.

⁵⁵ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktur Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum April 1999.

Secara konseptual upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh meliputi seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu *input*, proses, dan *output* dengan semua perangkat yang mendukungnya melalui: Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana Pendidikan.⁵⁶ Oleh karena itu, dalam standar pembiayaan satuan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah diperlukan proses dan semua perangkat pendukungnya dan ditetapkan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

8. Peningkatan Mutu pada Standar Penilaian Pendidikan

Pentingnya dijelaskan bahwa: Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.⁵⁷ Adapun pengertian Standar Penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.⁵⁸

Penciptaan rangkaian umpan balik yang terus-menerus merupakan elemen penting dalam proses jaminan mutu apapun. Evaluasi juga harus menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak boleh tertinggal sampai akhir program Studi. Hasil dari proses evaluasi harus dibicarakan dengan murid, dengan tujuan untuk melengkapi hasil evaluasi. Sikap melibatkan seluruh elemen akan sangat membantu dalam membangun kecakapan analitis para peserta didik. Institusi pendidikan juga perlu menggunakan

⁵⁶ Dikdasmen/setditjen/Perencanaan/ditjen-cross. Htm, *online* 12 Agustus 2013.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 th 2005,..., h. 191.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 th 2005,..., h. 191.

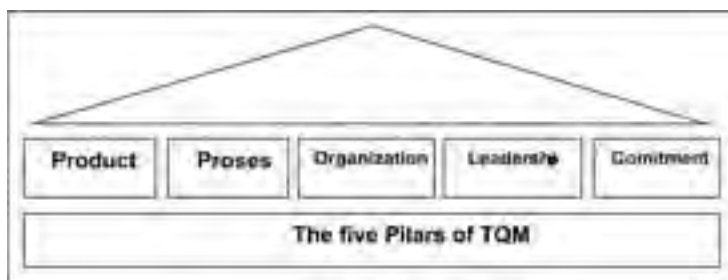
hasil pengawasan formal untuk menetapkan keabsahan program-programnya.

Institusi pendidikan harus siap untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja peserta didik yang belum sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Sebagaimana yang diketahui oleh para guru, hal ini bukan hal yang mudah. Karena hal ini bisa saja menjadi pengalaman emosional dan dapat membawa perubahan yang tak terduga. Yang perlu ditegaskan adalah langkah-langkah perbaikan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan pengalaman praktek kepada para peserta didik tentang penggunaan TQM yang dapat menyesuaikan diri dalam situasi apapun.

Sekolah harus memiliki *output* yang diharapkan. *Output* sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya *output* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *output* berupa prestasi akademik (*academic, achievement*) dan *output* berupa prestasi non-akademik (*non-academic achievement*). *Output* prestasi akademik misalnya, NEM, Lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berfikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah). *Output* non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerja sama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan prestasi olah raga, kesenian dan kepramukaan.

Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu adalah paduan sifat-sifat barang batau jasa, termasuk sistem manajemen yang relatif

establish dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.⁵⁹ Creech yang dikutip Husaini Usman menyarankan agar memperkuat lima pilar yang menunjang *Total Quality Management in Education*. Kelima pilar itu adalah sebagai berikut: Produk barang atau jasa merupakan mata rantai suatu pencaharian suatu organisasi. Produk yang bermutu tidak tercapai tanpa proses kerja yang bermutu. Kerja yang bermutu tidak akan tercapai tanpa organisasi yang dikelola dengan baik. Organisasi akan sia-sia tanpa kepemimpinan yang benar. Dan keempat pilar itu akan sia-sia tanpa adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan mutu. Penjelasan diatas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.4 Blok Diagram Lima pilar TQM

Sekolah harus memiliki *output* yang diharapkan. *Output* sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya *output* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *output* berupa prestasi akademik (*academic, achivement*) dan *output* berupa prestasi non-akademik (*non-academic achivement*). *Output* prestasi akademik misalnya, NEM, Lomba karya ilmiah remaja,

⁵⁹ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2006), h.10.

lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berfikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah). Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerja sama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan prestasi olah raga, kesenian dan kepramukaan.

C. Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru 2017-2018

Mulai tahun akademik 2017-2018, pemerintah menetapkan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), artinya sekolah hanya akan menerima siswa yang berdomisili sesuai zona wilayah sekolahnya. Sistem ini agar tidak ada segelintir sekolah yang dianggap favorit dan jadi tujuan semua siswa. Tujuan lain adalah agar semua siswa bisa tertampung, dan tidak ada yang disisihkan. Zonasi ini juga merupakan upaya pemerataan pendidikan. Bisa dibayangkan, kalau hanya ada beberapa sekolah yang jadi incaran siswa dari berbagai wilayah, maka siswa yang nilainya bagus saja yang akan masuk sekolah tertentu, sehingga standar nilai (UN) untuk masuk ke sekolah tersebut tinggi. Sebaliknya, kemungkinan besar ada juga sekolah yang akhirnya menerima siswa dengan nilai cenderung minim. Sehingga akhirnya ada sekolah favorit dan non favorit.⁶⁰

Menurut Muhadjir Effendy, dengan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semua sekolah harus jadi sekolah favorit, dan diharapkan tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah. Sistem zonasi ini berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017. Intinya, calon siswa

⁶⁰ Fatimah Ibtisam, <http://www.youthmanual.com/pos/author/fatimah-ibtisam>, 10 Juni, 2017, diunduh Selasa, 3 Juli 2017. 15.08 wita.

hanya bisa mendaftar di sekolah berdasarkan zonanya, dilihat dari alamat Kartu Keluarga. Pembagian zona sekolah sendiri ditentukan oleh dinas pendidikan provinsi. Jadi semua harus berdasarkan zona, hampir sekitar 90% siswa harus berasal dari alamat yang satu zona dengan sekolah tersebut. Ada juga jalur prestasi yang berasal dari alamat mana saja, tapi cuma 5%, sedangkan sisanya 5% persen untuk siswa yang pindah domisili.

Menurutnya, sebelumnya penerimaan murid baru di sekolah-sekolah negeri menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar murni (NEM). Akibatnya, banyak muncul sekolah-sekolah favorit yang berdampak negatif pada beberapa hal, seperti para murid berlomba untuk masuk sekolah favorit tersebut, sehingga banyak sekolah yang kurang favorit jadi kekurangan murid. Untuk itu pemerintah akan merubah sistem penerimaan siswa baru yang menggunakan NEM atau grade menjadi berdasarkan zonasi, sehingga semua sekolah baik negeri maupun swasta wajib untuk menerima murid-murid baru yang masuk dalam radius zonasinya. Muhadjir menambahkan untuk menerapkan sistem zonasi tersebut, peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), mulai dari SD hingga SMA sangat dibutuhkan karena ia akan menetapkan kuota masing-masing sekolah di zonanya.⁶¹ Menurut beliau lagi, selain membeda-bedakan sekolah pola penerimaan siswa baru seperti tahun sebelumnya juga rawan terjadi pungli, sebab orang tua mau membayar berapapun asal anaknya dapat masuk sekolah favorit.

⁶¹ <http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/24/penerimaan-siswa-baru-tahun-20172018-pakai-sistem-zona-ini-alasannya>. Diunduh: Senin, 3 Juli 2017. 14.58 Wita.

Sistem zonasi ini berlaku di tingkat SD, SMP, dan SMA Negeri, sedangkan untuk SMK sistem ini tidak diberlakukan. Sehingga siswa yang berencana untuk masuk SMK, bebas mendaftar di mana saja sesuai dengan minatnya. Ini karena SMK menawarkan program kejuruan yang berbeda-beda yang belum tentu SMK dengan jurusan tertentu tersebar merata di semua zona. Pertimbangan dalam menentukan diterimanya peserta didik SMA adalah: (1) Jarak tempat tinggal ke sekolah yang harus sesuai dengan ketentuan zonasi; (2) Usia yang sesuai; (3) Sertifikasi Hasil Ujian Nasional; (4) Prestasi di bidang akademik dan non-akademik (untuk jalur prestasi sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah); (5) Jalur prestasi bisa diikuti pelajar yang berprestasi, penilaian dan kriteria prestasi berdasarkan ketetapan pemerintah provinsi dan hanya bisa memilih satu pilihan sekolah, tapi pilihannya bisa di mana saja; (6) untuk jalur reguler bisa memilih sekolah berdasarkan zona yang sesuai dengan domisili. Ada 3 pilihan SMA dengan kriteria penilaian antara lain nilai rata-rata hasil UN, urutan pilihan sekolah, perbandingan UN yang lebih besar, dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam; serta Umur calon peserta didik baru.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penetapan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini, diantaranya: (1) Jarak rumah ke sekolah relatif nggak jauh; (2) Siswa dengan nilai UN tinggi lebih menyebar ke berbagai sekolah; (3) Kesempatan masuk SMA yang sesuai zona tempat tinggal akan semakin terbuka; (4) Menampung lebih banyak pelajar; (5) Pilihan SMA terbatas zona; (6) Motivasi UN bisa jadi berkurang; (7) Nilai masuk ke SMA favorit bisa jadi menurun; (8) Di sisi lain, misi pemerataan pendidikan memang baik, namun sepertinya kalau hanya sekadar sistem zonasi tidak cukup memberi solusi, harus ada langkah konkret lainnya,

seperti meningkatkan fasilitas sekolah, kemampuan guru, kualitas pendidikan, dan sebagainya.

D. Sistem Zonasi Sekolah sebagai Upaya Memeratakan Kualitas Pendidikan

KOMISI IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai penerapan zonanisasi atau pembagian wilayah per kecamatan dalam penerimaan siswa sekolah menengah (SMP) sederajat merupakan kebijakan pemerintah yang tepat. Sebab, dengan regulasi itu, upaya pemerataan pendidikan baik siswa, sekolah, maupun tenaga guru yang ada bisa terwujud. Menurut Yazidie Fauzie, semua sekolah statusnya sama, dan tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit sehingga menjadi rebutan masyarakat, semua zonasi sama per kecamatan atau berdasarkan kawasan wilayah tinggal dan keberadaan sekolah. Memang menurut beliau harus ada pertimbangan yang jelas, seperti adanya kemungkinan kekurangan murid karena dianggap kualitas tidak memungkinkan akan dapat hilang dengan sendirinya, karena ada pemerataan tadi.⁶² Sistem zonasi ini merupakan solusi yang bagus agar tidak ada lagi siswa yang tak bisa masuk sekolah, bahkan perlu didukung dengan peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidiknya hingga guru-guru yang baik harus disebar dan tak terkonsentrasi pada satu sekolah saja, dan jika memungkinkan guru-gurunya pun juga dilakukan sistem zona, sehingga tidak jauh dari kesekolah, dan Komisi IV akan mendukung sarana dan prasarana sekolah yang baik.

Sebelumnya itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan,

⁶² <http://jejakrekam.com/2017/06/02/sistem-zonasi-sekolah-dinilai-sudah-tepat/>.
Diunduh: Senin, 3 Juli 2017. Jam 15.12 wita.

Muhammadun mengatakan bahwa pemberlakuan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online* ada baik dan tidaknya. Namun hal itu sebagai bentuk pemerataan sehingga semua siswa bisa berkualitas dalam pendidikan dengan baik. Pemberlakuan sistem zonasi saat ini hanya sementara diberlakukan di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.⁶³ Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Akh. Muzakki menuturkan bahwa sistem zonasi sekolah ini telah dilakukan oleh negara-negara maju. Di Australia misalnya, di sana area rumah sangat menentukan diterima tidaknya seorang siswa untuk masuk ke sekolah. Sistemnya dibuat semacam *ring* yang dibagi menjadi zona terdekat, tengah, dan jauh. Bahkan, dalam berkas pendaftarannya, siswa yang bertempat tinggal jauh dan dekat dibedakan, semakin dekat dengan sekolah, peluang lolosnya otomatis lebih besar. Dengan sistem tersebut, pemerintah Negeri Kanguru itu dapat memastikan kualitas dan pemerataan pendidikan akan berjalan seimbang. Model tersebut juga membuat sekolah di Australia tidak pernah kekurangan murid hingga terpaksa ditutup.⁶⁴ Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Budaya (Disdikbud) Kota Banjarmasin, H. Fendi mengatakan bahwa penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini akan menghitung jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Untuk mengukur poin penilaian kelulusan calon peserta didik baru akan dihitung bobot per jarak. Jarak 0 sampai 1 Km bobot siswa nilainya 4, sedangkan, jarak 1,1 sampai 2 Km siswa akan mendapat bobot

⁶³ <http://jejakrekam.com/2017/06/02/sistem-zonasi-sekolah-dinilai-sudah-tepat/>. Diunduh: Senin, 3 Juli 2017. Jam 15.12 wita.

⁶⁴ <http://www.jawapos.com/read/2017/05/08/128454/ingin-memeratakan-kualitas-smasmk-ppdb-pakai-sistem-zonasi>. Diunduh: Senin, 3 Juli 2017. 14.44 Wita.

3, dan jarak 2,1 sampai 3 Km bobotnya 2, untuk jarak 3,1 Km sampai seterusnya, calon siswa baru diberi bobot 1. Untuk melihat jarak tempat tinggal calon siswa baru terhadap sekolah yang didaftarkannya calon siswa harus melampirkan kartu keluarga siswa yang bersangkutan, yang diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Bobot inilah yang menjadi acuan diterimanya siswa di sekolah baru, ketika ada bobot yang sama karena jaraknya sama antara calon siswa baru, Disdikbud Kota Banjarmasin menerapkan sistem usia, jika usianya pun sama, maka alternatif terakhir adalah nilai hasil ujian dari siswa didik di jenjang sebelumnya. Nilai ini alternatif terakhir yang utama dan prioritas dalam penilaian adalah jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah.⁶⁵

Ditambahkannya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jenjang SMP tak menerapkan sistem zonasi per kecamatan yang diterapkan di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA. Untuk diketahui, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA diterapkan zonasi kecamatan. Melalui sistem zonasi kecamatan ini, siswa yang berasal dari kecamatan yang satu tidak bisa mendaftar ke sekolah di kecamatan lain. Sementara untuk jenjang SMP konsep yang dipakai adalah zonasi jarak, jadi siswa yang jarak tempat tinggalnya jauh dengan sekolah, dipastikan akan sulit bersaing dan diterima. Sementara itu sistem pendaftaran online akan mendeteksi dan memberi penilaian langsung jarak calon siswa yang mendaftar di tiap sekolah. Namun demikian, bagi siswa berprestasi, diberi kesempatan besar untuk diterima meski jarak

⁶⁵ ProKalsel. Radar Banjarmasin. <http://kalsel.prokal.co/read/news/9564-sistem-zonasi-penerimaan-siswa-baru-jadi-polemik-seperti-ini-keluhannya.html>. Diunduh: Senin, 3 Juli 2017. 15.27 WITA.

antara tempat tinggalnya jauh dari sekolah yang didaftarkan. Dengan catatan siswa tersebut adalah benar benar berprestasi dengan dibuktikan sertifikat dan tanda penghargaan dari instansi yang berwenang. Dengan pola zonasi ini akan berdampak besar pada meratanya pendidikan yang bermutu di semua sekolah. Karena selama ini siswa yang bertempat tinggal di pinggiran kota ada yang bersekolah di tengah kota, akhirnya sekolah pinggiran pun ada yang minim siswa.⁶⁶ Dengan adanya pola seperti ini, tentunya diharapkan tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah tak favorit. Tetapi semua sekolah diharapkan menjadi sekolah favorit, sehingga perlu sinergi semua pihak.

⁶⁶ ProKalsel. Radar Banjarmasin. <http://kalsel.prokal.co/read/news/9564-sistem-zonasi-penerimaan-siswa-baru-jadi-polemik-seperti-ini-keluhannya.html>. Diunduh: Senin, 3 Juli 2017. 15.27 WITA.

BAB III

PEMETAAN MASALAH MUTU PENDIDIKAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menggambarkan keadaan geografis dan demografis kependidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin, sebagai upaya mengurangi disparitas kualitas pendidikan dalam rangka mengambil kebijakan pemerataan kualitas pendidikan dan di Kota Banjarmasin, khususnya Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah.

A. Karakteristik Lokasi Sekolah

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota dari 11 kota dan kabupaten yang berada dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan, terletak di ujung selatan dan berada diantara 3' 15" - 3' 22" Lintang Selatan dan diantara 114' 32" - 114' 38" Bujur Timur. Kota ini terhampar di dataran rendah (rata-rata datar) berawa-rawa 0,16 meter di permukaan laut. Dengan luas wilayah 72 km² atau 0,22 % dari luas wilayah Kalimantan Selatan. Kota ini dibelah oleh Sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada *drainase* kota mapun memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, di sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72,00 km atau 0,019 % dibanding luas wilayah Kalimantan Selatan , dengan komposisi luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Banjarmasin Utara 15,25 km² , Kecamatan Banjarmasin Selatan 20,18 km² Kecamatan Banjarmasin Barat 13,37 km², Kecamatan Banjarmasin Timur 11,54 km² dan Kecamatan Banjarmasin Tengah 11,66 km².

Kota Banjarmasin dengan visi Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Aman). Kota ini memiliki misi “Mewujudkan Kota Banjarmasin bertakwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera”. Tujuannya adalah Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banjarmasin Bidang Pendidikan adalah: (1) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; dan (3) Pemerataan Sekolah Unggul. Adapun Program Prioritas meliputi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan Program Pendidikan Anak Usia Dini. Sementara itu Program Unggulan adalah Bebas BiayaPungutan Sekolah (Program untuk Rakyat Miskin).



Gambar: 4.1. Peta Lokasi Penelitian di Kota Banjarmasin

B. Profil Lokasi Sekolah

1. Profil Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Banjarmasin

Total unit Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) di Kota Banjarmasin terhitung hingga Maret 2017 adalah 248 sekolah dengan total siswa sebanyak 59.566 orang pada tahun ajaran 2016/2017 dengan rincian pada Tabel 4.1. Total unit Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) di Kota Banjarmasin adalah 63 sekolah dengan total siswa sebanyak 8.400 orang pada tahun ajaran 2016/2017 dengan rincian pada Tabel 4.2.


Tabel 4.1 Profil SD di Kota Banjarmasin


No	Variabel	SD		Total
		Negeri	Swasta	
1	Sekolah *)	207	41	248
2	Siswa Baru Menurut Jenis Kelamin			
	Total	8.469	1.727	10.196
	a. Laki-laki	4.401	918	5.319
	b. Perempuan	4.068	809	4.877
3	Siswa Baru Menurut Umur			
	Total	8.469	1.727	10.196
	a. 6-7 Tahun	4.134	1.157	5.291
	b. Lainnya	4.335	570	4.905
4	Siswa Menurut Tingkat			
	Total	49.506	10.060	59.566
	a. Tingkat 1	8.532	1.740	10.272
	b. Tingkat 2	8.615	1.712	10.327
	c. Tingkat 3	8.527	1.759	10.286
	d. Tingkat 4	8.089	1.735	9.824
	e. Tingkat 5	7.781	1.664	9.445
	f. Tingkat 6	7.962	1.450	9.412
5	Siswa Menurut Kelompok Umur			
	Total	49.506	10.060	59.566
	a. Usia ≤ 6 Tahun	52	26	78
	b. Usia 7-12 Tahun	44.601	9.615	54.216
	c. Usia ≥ 13 Tahun	4.853	419	5.272

No	Variabel	SD		Total
		Negeri	Swasta	
6	Guru Menurut Kelompok Umur			
	Total	2.030	614	2.644
	a. Usia \leq 30 Tahun	576	235	811
	b. Usia 31-35 Tahun	435	111	546
	c. Usia 36-40 Tahun	244	60	304
	d. Usia 41-45 Tahun	160	91	251
	e. Usia 46-50 Tahun	230	75	305
	f. Usia 51-55 Tahun	385	42	427
	g. Usia \geq 56 Tahun	588	36	624
9	Guru Menurut Kualifikasi			
	Total	2.618	650	3.268
	a. < D1	142	51	193
	b. D1	3	1	4
	c. D2	150	8	158
	d. D3	7	6	13
	e. D4	1	0	1
	f. S1	2.253	565	2.818
	g. S2	62	19	81
	h. S3	0	0	0
11	Rombongan Belajar			
	Total	1.773	413	2.186
	a. Tingkat 1	303	73	376
	b. Tingkat 2	303	70	373
	c. Tingkat 3	301	71	372
	d. Tingkat 4	292	70	362
	e. Tingkat 5	288	67	355
	f. Tingkat 6	286	62	348

No	Variabel	SD		Total
		Negeri	Swasta	
12	Ruang Kelas			
	Total			2.198
	a. Baik			761
	b. Rusak Ringan			1.219
	c. Rusak Berat			218
13	Perpustakaan			
	Total			197
	a. Baik			80
	b. Rusak Ringan			104
	c. Rusak Berat			13
14	Laboratorium **)			
	Total			48
	a. Baik			29
	b. Rusak Ringan			18
	c. Rusak Berat			1
15	Kamar Mandi			
	Total			755
	a. Baik			321
	b. Rusak Ringan			372
	c. Rusak Berat			62

Keterangan:

 : *) Sekolah sudah melakukan Sync.

 : **) Laboratorium IPA, BAHASA, IPS, KOMPUTER, MULTIMEDIA.


Tabel 4.2 Profil SMP di Kota Banjarmasin


No	Variabel	SMP		Total
		Negeri	Swasta	
1	Sekolah *)	35	28	63
2	Siswa Baru Menurut Jenis Kelamin			
	Total	7,323	1,077	8,400
	a. Laki-laki	3,721	593	4,314
	b. Perempuan	3,602	484	4,086
3	Siswa Menurut Tingkat			
	Total	21,203	3,459	24,662
	a. Tingkat 7	7,340	1,089	8,429
	b. Tingkat 8	7,080	1,284	8,364
	c. Tingkat 9	6,783	1,086	7,869
4	Siswa Menurut Kelompok Umur			
	Total	21,203	3,459	24,662
	a. Usia ≤12 Tahun	133	37	170
	b. Usia 13-15 Tahun	17,772	2,826	20,598
	c. Usia ≥16 Tahun	3,298	596	3,894
5	Guru Menurut Kelompok Umur			
	Total	921	317	1,238
	a. Usia ≤ 30 Tahun	131	116	247
	b. Usia 31-35 Tahun	87	47	134
	c. Usia 36-40 Tahun	73	38	111
	d. Usia 41-45 Tahun	124	40	164
	e. Usia 46-50 Tahun	225	41	266
	f. Usia 51-55 Tahun	281	35	316
g. Usia ≥ 56 Tahun	223	33	256	

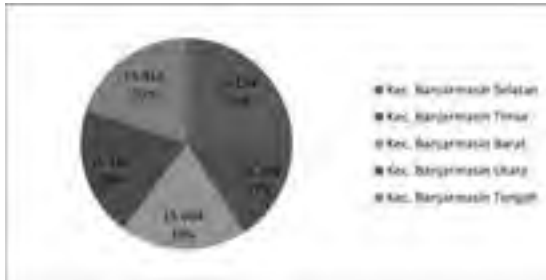
No	Variabel	SMP		Total
		Negeri	Swasta	
6	Guru Menurut Masa Kerja (MK)			
	Total	1,126	309	1,435
	a. MK <=04 Tahun	189	118	307
	b. MK 05-09 Tahun	158	66	224
	c. MK 10-14 Tahun	136	56	192
	d. MK 15-19 Tahun	110	23	133
	e. MK 20-24 Tahun	114	10	124
f. MK =>25 Tahun	419	36	455	
7	Guru Menurut Kualifikasi			
	Total	1,144	350	1,494
	a. SLTP	8	18	26
	b. SLTA	0	0	0
	c. D1	7	0	7
	d. D2	9	0	9
	e. D3	14	1	15
	f. S1	997	311	1,308
	g. S2	107	20	127
h. Data Kosong	2	0	2	
8	Guru Menurut Sertifikasi			
	Total	1,126	309	1,435
	a. PSPL	332	46	378
	b. PF	203	15	218
	c. PLPG	250	48	298
	d. Induksi	0	0	0
	e. PPG	1	2	3
	f. Lainnya	3	6	9
g. Data Kosong	337	192	529	

No	Variabel	SMP		Total
		Negeri	Swasta	
9	Rombongan Belajar			
	Total	673	148	821
	a. Tingkat 7	228	48	276
	b. Tingkat 8	227	53	280
	c. Tingkat 9	218	47	265
10	Ruang Kelas			
	Total			859
	a. Baik			361
	b. Rusak Ringan			465
	c. Rusak Berat			33
11	Perpustakaan			
	Total			58
	a. Baik			24
	b. Rusak Ringan			30
	c. Rusak Berat			4
12	Laboratorium **)			
	Total			148
	a. Baik			64
	b. Rusak Ringan			73
	c. Rusak Berat			11
13	Kamar Mandi			
	Total			243
	a. Baik			108
	b. Rusak Ringan			116
	c. Rusak Berat			19

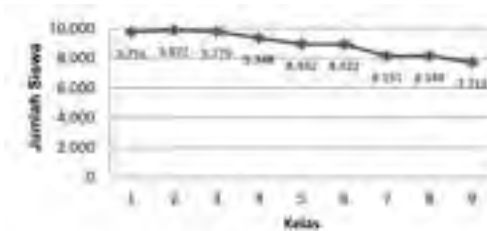
Keterangan:

 : *) Sekolah sudah melakukan Sync.

 :**) Laboratorium IPA/IPS/ Komputer



Gambar 4.2 Grafik Jumlah Siswa SD/MI dan SMP/Mts di Kota Banjarmasin



Gambar 4.3 Grafik Jumlah Siswa Kota Banjarmasin Berdasarkan Kelas



Gambar 4.3 Grafik Jumlah SD Negeri dan Swasta Per Kecamatan

Tabel 4.3 Kondisi Sarana/Prasarana Ruangan di Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Ajaran 2016/2017

No	Kota Banjarmasin	Ruang Kelas			Ruang Perpustakaan			WC Guru			WC Siswa		
		B	RR + RS	RB	B	RR + RS	RB	B	RR + RS	RB	B	RR + RS	RB
1	Kec. Banjarmasin Selatan	240	287	43	23	25	2	48	31	4	55	43	11
2	Kec. Banjarmasin Timur	134	206	53	17	19	2	21	31	3	29	39	3
3	Kec. Banjarmasin Barat	167	222	29	17	24	2	37	35	3	35	44	4
4	Kec. Banjarmasin Utara	120	199	55	13	17	4	23	27	11	39	39	12
5	Kec. Banjarmasin Tengah	100	305	38	10	19	3	12	35	3	22	48	8
Total		761	1,219	218	80	104	13	141	159	24	180	213	38

Keterangan: B = Baru ; RR = Rusak ringan; RS = Rusak sedang; RB = Rusak Berat

Tabel 4.4 Kondisi Sarana/Prasarana Laboratorium di Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Ajaran 2016/2017

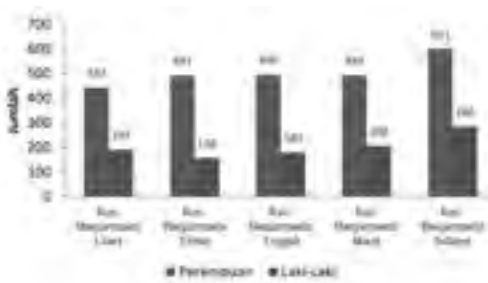
No	Kota Banjarmasin	Lab. IPA		Lab. Bahasa			Lab. IPS			Lab. Komputer			Lab. Multimedia			
		B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB
1	Kec. Banjarmasin Selatan	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	Kec. Banjarmasin Timur	2	1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	Kec. Banjarmasin Barat	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Kec. Banjarmasin Utara	3	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
5	Kec. Banjarmasin Tengah	3	2	0	0	2	0	0	0	0	7	4	1	1	0	0
Total		11	9	0	5	3	0	0	0	0	11	6	1	2	0	0

Keterangan: B = Baru ; RR = Rusak ringan; RS = Rusak sedang; RB = Rusak Berat

Tabel 4.5 Rekap Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Kota Banjarmasin

No	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Kec. Banjarmasin Utara	Kec. Banjarmasin Timur	Kec. Banjarmasin Tengah	Kec. Banjarmasin Barat	Kec. Banjarmasin Selatan	Jumlah
1	JK	P	444	493	496	493	601	2527
		L	191	158	180	208	286	1023
Jumlah			635	651	676	701	887	
2	Status Kepegawaian	GTY/PTY	67	43	199	93	124	526
		PNS	364	390	257	311	428	1750
		PNS Depag	2	2	5	4	1	14
		PNS Diberbantukan	0	0	1	2	3	6
		CPNS	2	4	4	5	4	19
		Guru Honor	159	168	167	230	285	1009
		Tenaga Honor	34	36	35	36	38	179
		Honor Daerah TK.I Provinsi	1	0	1	0	0	2
		Honor Daerah TK.II Kab/Kota	6	8	7	20	4	45
Jumlah			635	651	676	701	887	

No	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kec. Banjarmasin Utara	Kec. Banjarmasin Timur	Kec. Banjarmasin Tengah	Kec. Banjarmasin Barat	Kec. Banjarmasin Selatan	Jumlah
3	S2	17	14	14	14	27	86
	S1	537	549	562	574	733	2955
	D4	0	0	2	0	0	2
	D3	1	2	7	4	7	21
	D2	21	31	17	16	44	129
	D1	3	0	3	4	2	12
	SMA / sederajat	29	32	44	52	50	207
	Paket C	2	2	0	3	1	8
	SMP / sederajat	1	0	0	1	1	3
	Paket B	0	0	0	2	1	3
	SD / sederajat	2	1	2	0	2	7
	Lainnya	16	11	19	11	13	70
	Putus SD	0	0	0	1	0	1
	No Data	6	9	6	19	6	46
	Jumlah	635	651	676	701	887	



Gambar 4.4 Grafik Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Pemetaan Mutu Pendidikan Antar Kecamatan di Kota Banjarmasin

Pemetaan mutu pendidikan pada tiap kecamatan di Kota Banjarmasin dilakukan dengan *purposive sampling*, yakni dengan melakukan pendataan yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif terhadap Sekolah Dasar/ sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dengan jumlah siswa terbanyak dan jumlah siswa paling sedikit pada tiap kecamatan. Berdasarkan data jumlah siswa yang dikumpulkan, dipilih 20 sekolah dengan rincian pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Daftar Sekolah di Kota Banjarmasin yang Dikaji

No	Kecamatan	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Jumlah Peserta Didik
1	Banjarmasin Tengah	30304996	SD ISLAM SABILAL MUHTADIN	Jl. Jend.sudirman No.1	915
		30304328	SD MUHAMMADIYAH 7	Jl. Seberang Mesjid Rt.5 No.13	81
		30304191	SMP NEGERI 06	Jl. Veteran Gang Sempati No.06 RT.30 Banjarmasin	918
		30313786	SMP ADVENT	Jalan Pulau Laut No 64	12
2	Banjarmasin Barat	30312925	SD Islam Terpadu Nurul Fikri	Jln. Cempaka Raya Komp. Agraria II Gang 3 Perum Wijaya 1	496
		30313757	SD Muhammadiyah 1	Jl. S.parman No.221	70
		30304180	SMP Negeri 12	Jl. Ir.H.P. Muhammad Noor	917
		30305033	SMP H. A. Johansyah	Jl. Belitung Darat Gg. Tengku Umar Rt.17	17

No	Kecamatan	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Jumlah Peserta Didik
3	Banjarmasin Timur	30305066	SD Muhammadiyah 9	Jl.a.yani Km.3 Rt.1	623
		30312804	SD Harapan Bunda	Arthaloka Gatot Subroto Barat I No.25 Rt.26	32
		30304197	SMP Negeri 14	Jl. Benua Anyar Rt.3 No.14 Banjarmasin	825
		30304181	SMP Muhammadiyah 4	Jl. Pekapuran Raya RW. 1 RT. 9	104
4	Banjarmasin Utara	30304056	SD Negeri Sungai Jingham 5	Jl. Sungai Andai No 11 Rt. 02	667
		69901593	SD Islam Terpadu Permata Jannati	JALAN SULTAN ADAM KOMPLEK FAMILI PERMAI RT.20	55
		30304213	SMP NEGERI 15	Jl. Kuin Utara Rt.4 No.6	799
		69873979	SMP AL-ZAMZAMI	JALAN AMD RAYA NO.72 RT.25	75
5	Banjarmasin Selatan	30304341	SD Islam Terpadu Ukhuwah	Jl.bumi Mas Raya Komp. handayani	1,053
		30304456	SD Negeri Kelayan Tengah 2	Jl.kelayan B Gg.bersama Rt.21 No.24	69
		30304169	SMP Negeri 08	Jl. Gerilya No.54 Rt.18 Kel. Tanjung Pagar Bansel	793
		30304171	SMP PGRI 2	Jl. A. Yani Km.5,5	28

a. Kecamatan Banjarmasin Tengah

(1) Pendidikan Tingkat Dasar

Salah satu Lembaga Pendidikan Dasar di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dikategorikan memiliki siswa terbanyak adalah Sekolah Dasar Sabibal Muhtadin. Siswa SD Sabibal Muhtadin pada tahun ajaran 2017/ 2018 berjumlah 900 orang lebih. Setiap tingkatan kelas terdiri dari lima rombongan belajar yang masing- masing berkisar 28-30. Sosialisasi yang

dilaksanakan sekolah ini dalam bentuk penyebaran brosur ke berbagai lembaga pendidikan anak usia dini ataupun sosialisasi secara lisan di sekolah tersebut, maupun melalui radio Sabibal Muhtadin. Siswa yang bersekolah di lembaga berasal dari berbagai tempat, baik sekitar kawasan sekolah maupun luar kota seperti Kota Banjarbaru, mengingat sekolah ini tidak menerapkan sistem zonasi sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekolah ini menerima siapapun yang berasal dari berbagai tempat dengan melalui serangkaian tes yakni baca tulis berhitung, pengetahuan dasar, matematika, surah-surah pendek dan psikotes.⁶⁷

Tenaga pendidik di SD Sabibal Muhtadin ini terdiri dari 54 orang guru tetap yayasan, 18 orang guru bulanan, dan 24 orang guru Al-Quran orang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, disamping mereka harus punya kemampuan dalam membaca Al-Qur'an. Dimana pada setiap kelasnyaterdapat tiga guru, 1 orang guru kelas, 1 orang guru pendamping dan 1 orang guru Al-Quran. Sehingga dalam proses KBM tidak mengenal adanya kelas kosong. Disamping target-target yang perlu dicapai oleh guru, seiring dengan itu pula kesejahteraan guru pun terus ditingkatkan dengan gaji berkala dan Jamsostek.

Perpaduan antara ilmu agama dan umum, kualitas akademik dan non akademik yang sudah terbukti di berbagai bidang dan kurikulum yang diselenggarakan sekolah dalam bentuk kegiatan kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler menjadi alasan utama para orang tua siswa menjadikan sekolah ini sebagai pilihan. Namun yang paling utama adalah karena muatan agamanya yakni Al-Quran dan Tahfiz sebagai program

⁶⁷ Profil Sekolah SD Sabibal Muhtadin 2017/2018.

unggulan. Sejak dua tahun yang lalu sekolah ini sebagian kelasnya telah menerapkan Kurikulum 2013, dan tahun ini akan diterapkan untuk kelas I, II, IV dan V, sedangkan kelas III dan VI masih menggunakan Kurikulum KTSP. Disamping Kurikulum 2013 dan Kurikulum KTSP, sekolah ini juga mengkombinasikan dengan Kurikulum Agama. Hal ini bertujuan agar siswa mempunyai pengetahuan umum dan agama dengan kualitas sama baiknya. Porsi kedua keilmuaan tersebut diatur seimbang.⁶⁸

Adapun orientasi utama dari sekolah ini adalah penanaman karakter melalui pembiasaan. Misalnya dengan kegiatan shalat berjamaah dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu komitmen sekolah untuk menjadikan Al-Quran metode Tilawah dan Tahfizh sebagai program unggulan diberi porsi lebih banyak pada setiap harinya. Adapun ciri lain dari sekolah ini adalah dalam muatan lokal yang diisi dengan Bahasa Arab, Tamyiz dan Baca Tulis Al-Quran. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari hari Senin hingga Jum`at. Untuk siswa kelas I-III dari pukul 07.30 hingga 13.00 wita dan kelas IV-VI dari pukul 07.30- 16.00 wita, sedangkan pada hari Sabtu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun Al-Qur'an sebagai program unggulan dilaksanakan pada waktu pagi hari. Adapun hari Sabtu diisi dengan ekstrakurikuler pilihan, dan setiap anak memilih salah satu sesuai kegiatan pada jenjangnya. Selain itu sekolah juga sangat memperhatikan potensi lokal dan daerah dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Ekstrakurikuler. Misalnya dalam pelajaran SBK sekolah memberi muatan daerah seperti Tari Baksa Kambang, lagu-lagu daerah dan kreasi lokal. Sementara dana yang digunakan sekolah untuk keberlangsungan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ignasius Nurjaya, Kepala Sekolah SD Sabilal Muhtadin, Selasa 18 Juli 2017.

pendidikan dalam bentuk kurikuler, intra kurikuler maupun ekstrakurikuler ini didapatkan dari SPP dan dana APBN BOS Nasional, SPP yang dibayarkan siswa sebesar Rp. 600.000 sudah termasuk konsumsi.

Selanjutnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini ada Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 7, Sekolah Dasar Berbasis Agama Islam ini berada di bawah Yayasan Muhammadiyah yang telah berdiri sejak tahun 1960 di Kota Banjarmasin. Sekolah ini terletak di kawasan Kampung Melayu, Jalan Seberang Masjid Rt. 5 No. 13 Banjarmasin Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sekolah ini memiliki jumlah siswa terendah dibandingkan dengan Sekolah Dasar lainnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah.⁶⁹ Minimnya fasilitas juga sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah, seperti tidak adanya lapangan bermain untuk siswa, tidak ada ruang perpustakaan, dan ruang kelas yang minim fasilitas menjadi salah satu faktor kurangnya minat orang tua siswa untuk menitipkan pendidikan anaknya di sekolah ini. Alasan lain, karena Sekolah Negeri saat ini juga tidak memungut biaya pendidikan. Sehingga, Sekolah Dasar Negeri menjadi prioritas utama bagi para orang tua siswa. Kebanyakan dari siswa yang bersekolah di sini karena tempat tinggal mereka yang dekat juga kebanyakan dari orang tua mereka berjualan di Pasar Lama, sehingga akses yang dituju lebih mudah.⁷⁰

Tahun ajaran 2017/2018 ini jumlah siswa baru di kelas I hanya berjumlah 12 orang siswa dan total keseluruhan siswa

⁶⁹ Pemerintah Kota Banjarmasin. 2017. *Data Siswa Menurut Tingkat Per-Kecamatan Tahun 2016-2017*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Gafuri Rahman, S.Ag, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

berjumlah 70 orang. Upaya dalam meningkatkan siswa juga sudah dilakukan salah satunya dengan sosialisasi ke sejumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Banjarmasin. Selain itu, untuk menarik minat siswa sekolah mengadakan ekstrakurikuler berupa *drumband*. Kurikulum yang dipakai masih menggunakan Kurikulum 2006 yang dipadukan dengan kegiatan keagamaan, dimana setiap hari dari jam 07.00-07.45 kegiatan dilakukan di Masjid Syadzali yang terletak bersebelahan dengan gedung SD Muhammadiyah 7, diawali dengan sholat Tahiyatul Masjid, Sholat Dhuha, Tadarus Al-Qur'an, dan Kultum. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan proses KBM di kelas.⁷¹

Tahun ajaran 2017/2018 ini, SD Muhammadiyah 7 hanya menerima siswa baru sebanyak 12 orang siswa, sehingga total jumlah siswa dari kelas I hingga kelas VI adalah 76 orang siswa. Bagi kepala sekolah saat ini, kebijakan zonasi penerimaan siswa baru tidak ada pengaruhnya bagi sekolah ini. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1960, kebanyakan siswa berasal dari daerah sekitar SD Muhammadiyah 7 dan atau yang orang tuanya bekerja di Pasar Lama. Fasilitas relatif kurang memadai karena kurangnya dana dan tempat khususnya lapangan bermain untuk siswa. Mayoritas guru di sini adalah tenaga honorer dengan gaji yang kecil. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi drum band, pramuka, shalat bersama dan tadarus Al-Qur'an di masjid.

(2) Pendidikan Tingkat Menengah

Di Kecamatan Banjarmasin Tengah ini ada SMPN 6 yang beralamat di Jalan Veteran Gang Sempati No.06 Rt.30 Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sekolah ini memiliki jumlah siswa terbanyak khususnya di Kecamatan Banjarmasin

⁷¹ Hasil Observasi di SD Muhammadiyah 7 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

Tengah.⁷² Hal ini menandakan bahwa antusias orang tua untuk meyekolahkan anak mereka ke sekolah ini cukup tinggi karena memang sekolah sudah didukung dengan fasilitas, sarana prasarana pendidikan yang lengkap, juga banyaknya pilihan kegiatan ekstrakurikuler diluar jam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dan tercapainya kualitas pendidikan yang diharapkan. Tahun ajaran 2017/2018 ini sekolah mulai menerapkan sistem *full day school* dimana kewajiban siswa untuk bersekolah hanya 5 hari saja, tentunya dengan penambahan jam belajar daripada tahun sebelumnya.

Menurut Bapak H.Muhammad Yustan Adhli, M.Pd, Potensi lokal sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Banjarmasin, sekolah ini memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, dan sering mengikuti banyak lomba dan menuai banyak prestasi. Sekolah ini juga memiliki tingkat kelulusan 100% dalam Ujian Nasional, serta lingkungan yang nyaman dan tenang. Fasilitas sekolah lengkap, memiliki total 29 kelas, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan jaringan *wifi*. Sedangkan pekerjaan orang tua siswa sejauh ini kata beliau masih bervariasi.⁷³

Selanjutnya di Kecamatan Banjarmasin Tengah ada SMP Advent, sekolah ini dikategorikan terendah dalam jumlah siswa. SMP Advent ini berdiri tahun 2010 dibawah Yayasan Pendidikan Advent Banjarmasin yang terletak di Jalan Pulau Laut No.64 Rt.13. SMP Advent memiliki 20 orang murid dan 11 orang guru. Sekolah ini berada di lingkungan padat penduduk,

⁷² Pemerintah Kota Banjarmasin. 2017. *Data Siswa Menurut Tingkat Per-Kecamatan Tahun 2016-2017*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

⁷³ Wawancara dengan Bapak H.Muhammad Yustan Adhli, M.Pd, Wakil Kepala Sekolah SMPN 6 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2017.

heterogen, dengan berbagai profesi secara ekonomi, agama, dan berbagai latar belakang pendidikan. Sekolah yang berada dekat dengan sungai ini mempunyai Visi: 'Berorientasi pada Moral, dan Rasa Takut akan Tuhan'. Sekolah ini masih melaksanakan Kurikulum KTSP dengan keadaan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah ini masih perlu penambahan sarana untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menerima murid dari berbagai kalangan dengan memakai sistem subsidi silang. Kegiatan ekstrakurikuler yakni pramuka, bina vokal, musik gitar, musik piano, dan *English Club*. Sedangkan prestasi akademik 100% lulus Ujian Akhir Nasional (UAN). Sekolah mengunggulkan bidang mata pelajaran tertentu, seperti Matematika dan Bahasa Inggris. Sekolah menerapkan 5 hari kerja sehingga jarang ikut lomba. Meskipun begitu ada beberapa prestasi non akademik yang pernah di capai seperti kejuaraan bidang pramuka.⁷⁴

Potensi lokal dan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang merupakan keunggulan dari sekolah ini adalah Bahasa Inggris yang intensif, adanya *English Club*, dan bimbingan belajar. Punya Program Kunjungan ke orang tua murid untuk memperkuat kerjasama. Sementara untuk kemudahan akses dan jarak sekolah ini relatif mudah diakses karena jalan yang baik dari berbagai arah. Jarak murid yang paling jauh dari sekolah sekitar 8 km.

b. Kecamatan Banjarmasin Barat

(1) Pendidikan Tingkat Dasar

Salah satu lembaga Pendidikan Dasar di Kecamatan Banjarmasin Barat yang dikategorikan memiliki jumlah siswa terbanyak adalah SDIT Nurul Fikry, yang beralamat di Jalan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Ismail Panggabean, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Advent, Senin 17 Juli 2017. Sedikit dibantu Staf Anang.

Cempaka Raya Komplek Agraria II Gg. 3 Perumahan Wijaya I. Lembaga pendidikan ini sudah menggunakan Kurikulum 2013 untuk kelas I, II, IV dan V, sedangkan untuk kelas III dan VI masih menggunakan Kurikulum KTSP. Jumlah ruangan (kelas) yang terdapat di sekolah ini adalah kelas 1 memiliki 4 ruangan, kelas 2 memiliki 4 ruangan, kelas 3 memiliki 4 ruangan, kelas 4 memiliki 5 ruangan, kelas 5 memiliki 4 ruangan, dan kelas 6 memiliki 4 ruangan. Selain itu, sekolah memiliki ruang guru, ruang administrasi dan tata usaha. Sekolah memiliki halaman yang luas sering juga digunakan untuk upacara, senam, mata pelajaran olahraga dan kegiatan ekstra kurikuler yang memang membutuhkan lapangan yang luas.

Kegiatan ekstra kurikuler meliputi Futsal, Tilawah, *Khot* (kaligrafi), Menulis (cerita pendek), Bela Diri (Kempo), Renang, Badminton, Pidato (*da'i cilik*), Teater, *English Club* dan *Arabic Club*. Dari beberapa cabang kegiatan ekstrakurikuler tersebut maka sudah banyak prestasi yang diraih, meliputi: Juara I Lomba Renang Putra se-Kalimantan Selatan; Juara I Lomba Renang Putri se-Kalimantan Selatan; Juara I Lomba Menulis se-Kota Banjarmasin; Juara I Lomba Pantomim se-Kecamatan Banjarmasin Barat; Juara II Lomba Bela Diri se-Kecamatan Banjarmasin Barat, dan lain sebagainya.⁷⁵

Untuk keadaan tingkat ekonomi orang tua/wali murid di sekolah ini kebanyakan dari menengah ke atas. Orang tua/wali murid memilih sekolah ini karena mereka lebih menyukai anaknya belajar Agama Islam, selain itu jam sekolah yang dianggap sesuai dengan jam bekerja, yaitu murid-murid pulang sekolah pukul 14.30 WITA untuk kelas I sampai III, dan pukul

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Syarifani, Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikry, Selasa 18 Juli 2017.

16.30 WITA untuk kelas IV sampai VI. Lokasi sekolah berada jauh dengan jalan raya, dan memang sebagian besar tempat bekerja orang tua dekat dengan lingkungan sekolah. Pada tahun 2016 kemarin, jumlah murid yang diterima adalah 92 orang siswa, dimana murid-murid tersebar ke dalam 4 ruangan (kelas), sementara jumlah murid adalah 25 orang tiap kelas. Sedangkan layanan pendidikan di sekolah sudah memiliki website sendiri dan e-mail.

Selanjutnya di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah SD Muhammadiyah 1, lembaga ini merupakan Perguruan Muhammadiyah yang keberadaannya merupakan satu lokasi dengan lembaga pendidikan lain seperti SD, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK Muhammadiyah yang beralamat di Jalan S. Parman No.221 Banjarmasin. Pada tahun ajaran 2017-2018 lembaga ini menerima 12 orang siswa yang terdiri dari 7 orang siswa dan 5 orang siswi.⁷⁶ Menurut beliau, potensi lokal dan kualitas layanan yang dapat diunggulkan dari sekolah ini adalah sekolah ini berada dalam satu kompleks perguruan, sehingga memudahkan dalam pengawasan proses pembelajaran, selain itu kompleks ini berada di Jalan S. Parman yang merupakan jalan utama di Kota Banjarmasin yang memudahkan para orang tua untuk antar jemput anaknya. Layanan pendidikan berupa pelaksanaan Kurikulum K 13 untuk kelas I dan kelas IV, dan Kurikulum KTSP untuk kelas II, III, V, dan VI. Selain itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler berupa Tahfiz, HW/Pramuka, Seni Tari Daerah, Tapak Suci, dan futsal. Selain itu juga ada materi Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab.

Untuk menarik para orang tua, pihak sekolah sudah melakukan berbagai macam cara, diantaranya dengan sering

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Norheliyana Hasanah, S.Pd, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1, Senin 17 Juli 2017.

melaksanakan lomba-lomba untuk Taman Kanak-Kanak berupa lomba mewarna, dengan kegiatan ini menurut beliau para orang tua akan tahu keberadaan SD Muhammadiyah 1 ini sebagai lembaga pendidikan yang bisa jadi pilihan. Namun sekolah ini juga harus bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah ini seperti SDN Pasar Lama 1 dan SD Islam Muhammadiyah Sei Kindaung. Sekolah ini tetap menerapkan sistem SPP bagi para orang tua, namun tetap disesuaikan dengan keadaan penghasilan orang tua. Kebanyakan orang tua siswa berprofesi wiraswasta yang berada di sekitar Jalan S. Parman, Jalan AMD, dan Alalak.

(2) Pendidikan Tingkat Menengah

Di Kecamatan Banjarmasin Barat ada SMPN 12 yang beralamat di Jalan Ir. Pangeran H. M. Noor. Lembaga pendidikan ini dikategorikan sekolah yang memiliki jumlah siswa terbanyak, karena pada tahun ajaran 2017-2018 ini jumlah siswa adalah 950 orang untuk kelas VII, VIII dan IX. Jumlah ruangan (kelas) sebanyak 26 ruangan, dimana kelas VII mempunyai 7 ruangan, kelas VIII mempunyai 10 ruangan, kelas IX mempunyai 9 ruangan, dengan jumlah murid dalam sebuah kelas maksimal 32 orang. Di sekolah ini, terdapat lapangan untuk upacara, mata pelajaran olahraga dan kegiatan ekstra kurikuler yang memang menggunakan lapangan. Selain itu, terdapat laboratorium komputer/multimedia, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa (Inggris) dan laboratorium keterampilan. Kurikulum yang digunakan sekolah ini adalah Kurikulum 2013 untuk kelas VII, sedang untuk kelas VIII dan IX menggunakan Kurikulum KTSP. Kegiatan ekstra kurikuler meliputi Pramuka, PMR, Paskibra, Futsal, Basket, Bola Volly, Bulu Tangkis dan Pencak Silat. Prestasi sekolah yang monumental pernah diraih adalah Lomba Pramuka mewakili Kalimantan Selatan untuk Tingkat

Nasional; dan Juara Umum Lomba Sekolah Bersih dan Sehat se-Kota Banjarmasin. Sementara untuk tingkat sosial ekonomi orang tua/wali murid di sekolah ini adalah dari menengah ke bawah, misalnya sebagai buruh di pelabuhan sebanyak 60% pekerjaan orang tua/wali murid.⁷⁷

Selanjutnya di Kecamatan Banjarmasin Barat ada SMP H. Johansyah yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gg. Teuku Umar Rt. 17. Sekolah ini termasuk sekolah yang kurang peminat karena pada tahun 2017 ini hanya memiliki 15 orang siswa dengan 9 orang guru termasuk Kepala Sekolah. Dari sembilan guru tersebut, terdapat 4 orang guru yang sudah bersertifikat pendidik, karena kekurangan jam mengajar maka untuk memenuhi beban mengajar, mereka penuh ke sekolah lain. Sekolah ini memiliki 3 buah Ruang Kelas, 1 buah Ruang Guru dan Kepala Sekolah, serta 1 buah ruang Aula.

Walaupun sekolah ini swasta, pihak sekolah ini tetap menggratiskan seluruh biaya sekolah, tidak ada pungutan tertentu layaknya sekolah swasta yang lain. Ujar Sidin: “*digratiskan aja..., sains aja urangnya, kayapa handak babayar....*”. Menurut beliau, langkah ini satu sisi ini menjadi langkah strategis sekolah untuk menarik minat masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah ini.⁷⁸ Karena sekolah ini meniadakan pungutan siswa, maka otomatis seluruh biaya operasional sekolah diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

⁷⁷ Wawancara dengan Satoli, S.E., M.M., Kepala Sekolah SMPN 12 Banjarmasin, Senin, 17 Juli 2017.

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. Rusman, Kepala Sekolah SMP H. Johansyah, Senin 17 Juli 2017.

Hampir seluruh anak yang sekolah di sini berasal dari keluarga yang kurang mampu, pekerjaan orang tua mereka seperti tukang becak, buruh kasar, bahkan ada yang tidak punya ayah (yatim). Kepala sekolah tetap berusaha mempertahankan eksistensi sekolah ini, beliau memiliki rencana untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini sebagai pilihan utama. Seperti mulai tahun pelajaran 2017-2018 ini beliau mengusahakan adanya ekstrakurikuler Tahfiz Al-quran. Menurut beliau, usaha ini yang lebih memungkinkan dapat terlaksana di tahun ini. Beliau berusaha menampilkan sesuatu yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar. Sekolah keagamaan lain yang ada di sekitar seperti MTs Al-Huda dan MTs Al-Inayah tidak menawarkan hal serupa. Beliau berharap, dengan adanya sesuatu yang berbeda itulah, akan dapat menarik minat masyarakat menyekolahkan anak mereka ke sekolah ini.

c. Kecamatan Banjarmasin Timur

(1) Pendidikan Tingkat Dasar

Di Kecamatan Banjarmasin Timur ada SD Muhammadiyah 9 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani km.3 Rt.1 Kelurahan Kuripan. Sekolah ini dikategorikan sekolah yang memiliki jumlah siswa terbanyak di Kecamatan Banjarmasin Timur. Sekolah ini sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai, didukung Kepala Sekolah yang sudah memiliki Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah (Diksuspa). SD Muhammadiyah 9 ini menggunakan Kurikulum K.13 dan KTSP, serta memadukan pembelajaran Al-Islam sebagai ciri khas sekolah Muhammadiyah dengan menonjolkan program Tahfiz dan pembiasaan shalat berjamaah. Mulai Tahun ajaran

2017-2018 menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter (PKK) dengan 5 hari aktif belajar.⁷⁹

Visi SD Muhammadiyah 9 adalah Membentuk pribadi yang berbudhi luhur, bertqwa kepada Allah SWT, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan Misinya adalah: (1) Mengembangkan kurikulum yang berwawasan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam nuansa IMTAQ (Iman dan Taqwa); (2) Mengkondisikan pembelajaran yang sejuk dan berakhlakul karimah denga pola Uswatun Hasanah (keteladanan yang baik); (3) Membuat kegiatan-kegiatan ekstra yang menuntut peran serta seluruh siswa dalam pembinaan kreatifitas, sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, rajin dan khusuk dalam beribadah; (4) Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran yang menggembirakan siswadalam proses kegiatan belajar mengajar. Sementara tujuan SD Muhammadiyah 9 adalah: (1) Membentuk manusia muslim yang beriman; (2) Bertaqwa; (3) Berakhlak Mulia; (4) Cakap; (5) Percaya pada diri sendiri; (6) Berdisiplin; (7) Bertanggung Jawab; (8) Cinta tanah air; dan (9) Berguna bagi masyarakat.

Siswa SD Muhammadiyah 9 pada tahun ajaran 2017/ 2018 berjumlah 613 orang. Setiap tingkatan kelas terdiri dari tiga rombongan belajar yang masing- masing berkisar 34-36. Namun setiap tahunnya sekolah berupaya mengurangi jumlah siswa per rombongan belajar hingga mencapai jumlah ideal yakni 30 orang siswa. Sosialisasi yang dilaksanakan sekolah ini dalam bentuk penyebaran brosur ke berbagai lembaga pendidikan anak usia dini ataupun sosialisasi secara lisan di sekolah tersebut, maupun melalui media sosial. Untuk sekolah TK yang membantu siswanya masuk ke sekolah ini akan diberikan intensif walupun

⁷⁹ Profil SD Muhammadiyah 9 Tahun 2016-2017.

sekedar uang ganti pemasangan spanduk ataupun penggandaan brosur.⁸⁰ Siswa yang bersekolah di sini berasal dari berbagai tempat, baik sekitar kawasan sekolah, dalam maupun luar kota seperti Gambut hingga Banjarbaru. Mengingat sekolah ini tidak menerapkan sistem zonasi sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah, sekolah ini memprioritaskan siswa yang saudaranya sudah bersekolah di tempat ini tanpa mengesampingkan hasil uji baca Al-Quran, potensi akademik dan psikotes.

Tenaga pendidik di sekolah ini terdiri dari 32 orang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Adapun tenaga pengajar khusus untuk tadarus dan tahfiz terdiri dari 73 orang. Meskipun dulunya sistem rekrutment tenaga pendidik hanya mengandalkan lulusan S1 Jurusan apapun, namun sekolah tetap memfasilitasi mereka untuk menempuh kembali pendidikan sesuai bidang masing-masing. Adapun saat ini sistem rekrutmen guru lebih selektif sesuai dengan linieritas dengan bidang studi yang diajarkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan input SDM di samping PORLAP DIKTI yang mengkondisikan hal demikian.⁸¹

Integrasi antara ilmu agama dan umum, kualitas akademik dan non akademik yang sudah terbukti di berbagai bidang dan kurikulum yang diselenggarakan sekolah dalam bentuk kegiatan kurikuler, ekstra dan intrakurikuler menjadi alasan utama para orang tua siswa menjadikan sekolah ini sebagai pilihan. Di samping itu, kemudahan akses orang tua ke tempat kerja juga menjadi alasan yang tidak kalah pentingnya, hal ini terbukti bahwa banyak terdapat siswa yang orang tuanya bekerja di

⁸⁰ Wawancara dengan Ir. Hj. Tri Hariani Sawitri, S.Pd, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9, Selasa 18 Juli 2017.

⁸¹ Wawancara dengan Miftah Khait, S.H.I., Staf Tata Usaha SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2018.

Instansi Pemerintahan terdekat, seperti PDAM Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin, dan UIN Antasari Banjarmasin.

Sekolah sangat memperhatikan potensi lokal dan daerah dalam proses KMB, ekstrakurikuler dan bermasyarakat. Dalam mata pelajaran muatan lokal misalnya, Bahasa Banjar, permainan Balogo dan Batungkau. Dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya menari tarian Banjar, menyanyikan lagu Banjar. Kedepannya sekolah berencana menggalakan *banjar day* disamping *English* dan *Arabicday*. Adapun dalam kegiatan bermasyarakat, sekolah memanfaatkan masyarakat sekitar dalam mengelola catering untuk mempersiapkan *snack* dan makan siang guru dan siswa.⁸² Sedangkann Peranserta sekolah dalam ruang lingkup rayon Kecamatan Banjarmasin Timur berperan aktif dalam kegiatan KKG, MGMP, dan K3S. Pihak sekolah selalu memberi kontribusi dalam hal *sharing* pengalaman kerja, program ataupun perjalanan studi banding. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di wilayah yang berdekatan. Dalam arti lain bahwa sekolah tidak menganggap dirinya eksklusif namun tetap berbagi untuk kemajuan bersama, hanya saja tergantung pihak sekolah dalam menindaklanjuti dalam bentuk kegiatan yang bervariasi.

Dana yang digunakan sekolah untuk keberlangsungan pendidikan dalam bentuk kurikuler, intra maupun ekstrakurikuler didapatkan dari SPP, Infaq dan dana APBN BOS Nasional. SPP yang dibayarkan siswa bervariasi tergantung pilihan dan kemampuan orang tua, dari yang tinggi (Rp. 150.000) hingga rendah bahkan tanpa dipungut biaya apapun karena alasan tertentu. Dengan demikian berlakulah subsidi

⁸² Wawancara dengan Suhrawardi, S.Ag. S.Pd. Wakil Kepala Urusan Kesiswaan, SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2017.

silang, disamping ada tambahan dana dari infaq Jum`at, GNOT, dan bantuan siswa miskin.⁸³

Sejak tahun ini SD Muhammadiyah 9 menerapkan sistem *full day school* dengan 5 hari waktu sekolah. Kelas I dan II mengakhiri pelajaran pukul 14.00 wita, mereka mengerjakan shalat dzuhur berjamaah dan makan bersama secara bergantian. Adapun waktu belajar siswa kelas III hingga VI pada pukul 16.00 wita, dimana dua jam terakhir sebelum pulang diisi dengan kegiatan pembimbingan. Dua minggu pertama dan ketiga pada setiap bulannya dilaksanakan upacara bendera sedangkan minggu kedua dan ketiga dilaksanakan muhadharah tiga bahasa. Sama halnya dengan kegiatan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah dilaksanakan pada setiap jumat secara bergantian.

Selain kegiatan kurikuler, siswa difasilitasi dengan kegiatan ekstrakurikuler, dimana siswa dibebaskan untuk memilih kegiatan yang mereka minati. Dari sekian ekstrakurikuler yang disajikan, *drumband* yang juga menjadi salah satu ikon sekolah ini merupan kegiatan yang paling diminati, selain futsal, seni tari, tilawah dan *club sains*. Kedepannya sekolah juga menyajikan hal baru yakni memanah dan robotik yang juga akan menjadi program andalan. Namun saat ini masih dalam penjangkauan dan kerjasama mengingat dana yang dibutuhkan untuk dua kegiatan tersebut cukup besar. Sedangkan sekolah tidak lagi memungut biaya ekstrakurikuler kepada siswa kecuali jika siswa bersangkutan mengikuti *event* tertentu. Untuk setiap kegiatan sekolah menyiapkan tenaga profesional baik dari dalam maupun luar sekolah.

⁸³ Wawancara dengan Miftah Khait, S.H.I., Staf Tata Usaha SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2018.

Selain kegiatan di atas terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan sekolah yang sifatnya insidental, seperti apresiasi siswa. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada setiap peringatan Hari Besar Islam dan Nasional. Bentuk kegiatan ini bersifat akademik, seni dan olahraga. Kegiatan lain yang bersifat sosial semisal Bhakti Sosial pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Dulunya sekolah membagikan ke daerah karang Intan dan Kurikit. Namun saat ini diorientasikan kepada masyarakat sekitar. Dari 100 sembako, 40% dibagikan untuk masyarakat Kelurahan Kebun Bunga, dan 60% untuk masyarakat di lingkungan Kelurahan Kuripan, dimana waktu pelaksanaannya menjelang bulan ramadhan. Disamping itu, ada juga pembagian sembako untuk paman becak yang mengantarkan siswa kelas 6 menuju lokasi perpindahan, yang biasanya berlangsung di Auditorium UIN Antasari Banjarmasin.

Selanjutnya di Kecamatan Banjarmasin Timur ada SD Harapan Bunda, lembaga pendidikan Tingkat Dasar ini beralamat di Jalan Artaloka Gatot Subroto Barat I Rt.26 No.24 Banjarmasin. Lokasi lembaga pendidikan ini sebenarnya cukup mudah untuk dijangkau, hanya saja areanya sedikit sepi dan tidak terlalu banyak dilewati orang, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Sekolah ini adalah sekolah inklusi yang menerima siswa normal maupun berkebutuhan khusus. Ruangan dalam gedung ini masih terbatas, karena sarana dan prasarana sekolah disesuaikan dengan luas dan jumlah ruangan. Ruangan seperti laboratorium dan UKS tidak memiliki ruang khusus, tapi bergabung dengan ruang lain. SD Harapan Bunda ini berada satu gedung dengan *playgroup*, Taman Kanak-Kanak, dan SMP Harapan Bunda. Dari depan tidak tampak seperti gedung

sekolah, karena bertingkat hingga 3 lantai dan tidak memiliki pekarangan yang luas dan taman bermain di depannya.⁸⁴

Menurut Ibu Mardiatul, S.Pd, yang seorang Alumni Universitas Lambung Mangkurat, program zonalisasi yang sedang dilaksanakan mulai Tahun 2017-2018 ini tidak memberikan efek khusus terhadap sekolah SD Harapan Bunda. Penerimaan di sekolah ini tahun sebelumnya ada tiga orang siswa. Sedangkan tahun ini menurun menjadi 2 orang karena 1 orang siswa membatalkan. Namun, bagi Kepala Sekolah secara pribadi, program zonalisasi ini cukup bagus untuk pemerataan penerimaan siswa di sekolah-sekolah yang ada di Kota Banjarmasin, hanya saja diperlukan penyetaraan kualitas sekolah untuk menunjang.⁸⁵

(2) Pendidikan Tingkat Menengah

Untuk pendidikan Tingkat Menengah, di Kecamatan Banjarmasin Timur ada SMP Muhammadiyah 4 yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Rw.01 Rt.09 Kota Banjarmasin. Sekolah ini dikategorikan memiliki jumlah siswa terendah, untuk Tahun ajaran 2017-2018 ini hanya memiliki total siswa baru sebanyak 26 orang siswa. Sekolah ini memang memiliki fasilitas standar dengan total 15 orang guru. Menurut Pak Ridwan, kebijakan zonasi penerimaan murid baru ini tidak ada membawa dampak pengaruhnya bagi SMP Muhammadiyah 4, karena berdampak mengurangi motivasi belajar siswa yang hanya mengutamakan kelulusan saja bukan lagi berdasarkan nilai/prestasi, sebagai

⁸⁴ Observasi Lapangan SD Harapan Bunda, Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2017.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Mardiatul, S.Pd, Kepala Sekolah SD Harapan Bunda Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2017.

guru senior di SMP Muhammadiyah 4 ini beliau menyarankan untuk kembali saja ke sistem awal yaitu berdasarkan nilai.⁸⁶

d. Kecamatan Banjarmasin Utara

(1) Pendidikan Tingkat Dasar

Untuk Kecamatan Banjarmasin Utara, ada SDIT Permata Jannati, yang dikategorikan memiliki jumlas siswa terendah. Sekolah ini berdiri tahun 2013. Dibawah Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Permata Jannati, terletak di Jalan Sultan Adam Komplek Famili Permai Rt. 20 No.37. sekolah ini memiliki murid sebanyak 99 orang dan guru sebanyak 12 orang termasuk guru tahfiz. Sekolah berada di lingkungan padat penduduk, dengan berbagai profesi ekonomi dan berbagai latar belakang pendidikan. Sekolah yang berada didekat dengan sungai ini memiliki Visi: Membangun Generasi Hapal Al-Qur'an, Cerdas IPTEK dan Sosial. Lembaga ini sudah melaksanakan Kurikulum 2013 dan berbasis Alquran dan Hadits. Sarana prasarana sangat memadai, semua kelas memiliki ruang full AC, LCD proyektor. Sarana bermain murid lengkap, namun perlu penambahan beberapa ruang kelas. Sekolah ini menerima murid dari berbagai kalangan, sehingga memakai sistem subsidi silang, dimana orang tua yang mempunyai mensubsidi yang kurang mempunyai.

Kegiatan ekstrakurikuler yakni Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, *robotic* dan multimedia, tilawah, *cooking* dan *drawing class*, taekwondo, kunjungan ke Panti Asuhan, *waterboom*, bioskop 6 dimensi, pramuka, melukis, tari, *zoo*, dan lain-lain. Sekolah ini memiliki puluhan prestasi yang pernah diraih. Seperti meraih juara I, II, dan III diberbagai lomba Tahfiz Alquran, Tilawah, Tartil, Bidang Keagamaan lainnya, dan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ridwan, Guru Senior di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2017.

Taekwondo. Prestasi yang sangat membanggakan adalah pernah juara III Tahfiz Al-quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, juara I FASI Tingkat Provinsi Tahun 2014, dan juara III taekwondo tingkat Nasional Tahun 2016. Dengan adanya SDIT Permata Jannati ini maka muncul fenomena lokal berupa sekolah swasta/negeri berbasis keagamaan, dan berbasis pendidikan karakter.⁸⁷

Potensi lokal dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, sekolah ini mempunyai program khusus, yakni Tahfiz Al-quran. Karena masih SD, maka diproyeksikan jumlah hapalannya sekitar dari 4 sampai 10 juz setelah tamat. Sering dilakukan *muraja'ah* (pengulangan) setoran hapalan Alquran yang dilakukan setiap hari. Kegiatan ini dilakukan secara formal dan melalui ekstrakurikuler. Metode yang dipakai seperti Tibyani, Qira'ati, Banjary, Qasimi, dan Ummi. Metode yang dipakai bisa berbeda-beda karena murid juga berbeda. Selain Tahfiz Alquran, sekolah ini juga sangat memperhatikan pembentukan karakter (*character building*) sejak usia dini. Masa SD untuk penguatan dari masa PAUD, yang secara kebetulan yayasan juga punya lembaga pendidikan PAUD.

Sementara untuk kemudahan akses dan jarak, sekolah ini mudah diakses. Letaknya strategis dan banyak jalan menuju sekolah. Sudah ada jalan hasil usaha yayasan dan waqaf dari masyarakat. Jarak murid yang paling jauh sekitar 15 km dari sekolah.

⁸⁷ Wawancara dengan Ketua Yayasan/Kepala Sekolah SDIT Permata Jannati, Heri, M. Kom, Senin Tanggal 17 Juli 2017. Sedikit dibantu Staf Koordinator Sekolah, Ibu Mira Zahni, S.Pd.

(2) Pendidikan Tingkat Menengah

Di Banjarmasin Utara ada SMP yang dikategorikan memiliki jumlah siswa terendah, yaitu SMP Al-Zam Zami. Sekolah ini berdiri Tahun 2013 dibawah Yayasan Pendidikan Harapan Banua (YPHB). Ketua yayasan/donatur yang banyak berperan disamping donatur lainnya, adalah Bapak Anwari Hazimi. SMP ini terletak di Jalan AMD Raya No.72 Rt.25. Sekolah ini memiliki murid sebanyak 88 orang dan guru sebanyak 12 orang. Sekolah ini berada di lingkungan penduduk yang tidak terlalu padat, dengan berbagai profesi ekonomi seperti pedagang, PNS, BUMN, petani, kuliner, buruh, nelayan, industri kreatif, dan sebagainya. Berbagai latar belakang pendidikan dari Sarjana, SMA, SMP, SD. Masyarakat sekitar masih berbudaya gotong royong. Visi sekolah yang berada dekat sungai ini adalah: Mewujudkan Pendidikan yang Berkarakter, Berbudi Pekerti, Punya Keagamaan yang Kuat.

Potensi lokal dan Kualitas Pelayanan Pendidikan SMP Al-Zam Zami berupa Tahfiz Al-quran, Acara Keagamaan, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Kualitas layanan yang diunggulkan oleh sekolah yakni menampung anak yatim, anak tidak mampu, anak putus sekolah sebagai usaha untuk untuk membantu pemerintah. Sekolah ini tidak memungut biaya atau gratis, bahkan sering membantu berbagai keperluan siswa. Sementara untuk kemudahan akses dan jarak, sekolah ini mudah diakses karena jalan menuju sekolah banyak dan baik. Murid-murid berasal dari sekitar sekolah dan yang terjauh sekitar 7 km dari sekolah.

Sekolah masih memakai Kurikulum KTSP dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal yang sangat menonjol sekolah ini mempunyai gedung olahraga futsal yang besar dan representatif. Sekolah ini masih perlu beberapa ruang kelas,

yang sekarang sedang dibangun. Sekolah menerima murid dari berbagai kalangan, namun khususnya menerima dari kalangan tak berpunya, menengah kebawah, anak yatim, anak putus sekolah, dan sebagainya yang semuanya gratis tanpa dipungut biaya, bahkan dapat subsidi pakaian, buku, dan lain-lain.⁸⁸ Kegiatan ekstrakurikuler yakni Tahfiz Al-quran, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, kegiatan keagamaan, komputer, pramuka, olahraga futsal dan sebagainya. Prestasi akademik berupa 100% lulus Ujian Akhir Nasional (UAN), sedangkan prestasi non akademik juara III Mengaji Tingkat Kecamatan, juara I futsal, dan sebagainya. Adanya SMP Al-Zam Zami ini memunculkan fenomena lokal berupa adanya sekolah swasta/negeri berbasis keagamaan, dan berbasis pendidikan karakter untuk persaingan global.

Berbeda dengan SMP Al-Zam Zami, di Kecamatan Banjarmasin Utara ini ada SMPN 15 yang dikategorikan sekolah yang paling banyak jumlas siswanya, SMPN 15 ini beralamat di Jalan Kuin Utara Rt.4 No.6. Menurut Kepala Sekolah Ibu Hj. Mirna Hartatilani, M.Pd, beliau mengatakan bahwa sekolah ini memiliki 23 rombel dengan 50 orang guru 50, belum termasuk guru-guru honorer. Sekolah ini memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibraka, futsal, tari, Maulid Habsyi, Palang Merah Remaja (PMR) dan Pramuka. Prestasi yang sudah di capai sekolah terdapat 4 siswa yang sudah mewakili kejuaraan untuk PORDA; pernah menjuarai paskibraka, dan masuk nominasi Sekolah Sehat Tingkat Kota Banjarmasin tahun 2017. Sementara itu sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Husaini, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Al-Zam Zami, Senin 17 Juli 2017. Sedikit dibantu Staf Sekolah Bapak H. Syamsuddin.

sudah cukup memadai, walaupun kamar mandi dan WC masih dianggap kurang untuk jumlah siswa sebanyak itu.⁸⁹

Disamping prestasi sekolah di atas, menurut beliau sekolah ini juga menerapkan kebijakan untuk mengkhatamkan Al-quran bagi siswa ketika lulus sekolah. Oleh karena itu, setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, seluruh kelas wajib melaksanakan tadarus Al-quran yang diawasi oleh guru-guru yang mengajar di jam pertama. Kelas VII ditargetkan mengaji sampai 10 juz, kelas VIII sampai 20 juz, sementara kelas IX sampai 30 juz. Sehingga ketika kelulusan, peserta didik tidak hanya mendapatkan sertifikat kelulusan sekolah, tetapi mereka juga akan mendapat Surat Keterangan khatam Al-quran dari sekolah. Kegiatan ini menjadi salah satu hal yang menarik, mengingat karakteristik masyarakat Kuin Utara yang sangat religius.

Dari sekian prestasi dan sarana prasarana yang memadai, wajar bila sekolah ini memiliki jumlah peserta didik terbanyak di Kecamatan Banjarmasin Utara. Namun yang perlu dicermati disini adalah dedikasi, kedisiplinan, dan kreatifitas para guru yang justru menjadi faktor yang dominan, yang dapat menjadikan sekolah ini menjadi seperti sekarang. Para guru sangat dituntut berdisiplin di sekolah ini. Guru-guru juga dituntut untuk hadir sesegera mungkin. Guru-guru secara bergantian menunggu peserta didik di pintu gerbang sekolah untuk menyambut dan menerima salaman dari siswa yang datang. Tindakan ini tentu saja memberi efek besar kepada kedisiplinan sekolah secara umum.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Mirna Hartatilani, M.Pd, Kepala Sekolah SMPN 15, Senin 17 Juli 2017.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sudiatmoko, Wakasek Bidang Kurikulum SMPN 15 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

Selanjutnya Sudiatmoko mengatakan bahwa faktor kreatifitas Kepala Sekolah yang senantiasa berfikir dan bertindak untuk selalu memajukan sekolah. Kepala Sekolah ini dengan dedikasi yang tinggi selalu berusaha membangun mitra dengan lembaga lain di luar sekolah. Pernah Kepala Sekolah menghubungi Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk minta bantuan pembangunan kelas, dan ternyata membuahkan hasil. Kepala Sekolah juga berhasil membangun kepercayaan dan kerja sama yang baik dengan para orang tua peserta didik. Peserta didik bisa dikatakan hampir semuanya berasal dari sekitaran Kuin Utara. Walaupun kebanyakan mereka berasal dari keluarga menengah ke bawah, namun kerja sama orang tua tampak terlihat ketika ada sumbangan sukarela untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

e. Kecamatan Banjarmasin Selatan

(1) Pendidikan Tingkat Dasar

Di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah Banjarmasin adalah lembaga pendidikan tingkat dasar yang dikategorikan memiliki jumlah siswa terbanyak. Lembaga ini pada awalnya berlokasi di Panti Asuhan Al-Muddakir Jalan Benua Anyar Rt.4 No.55 Komplek Masji Al-Amin Tahun 2001-2005, namun sejak Tahun 2005 sampai sekarang sudah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani XII A Rt. 33 Kelurahan Pemurus Kecamatan Banjarmasin Selatan. SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin memiliki Visi: 'Meluluskan siswa-siswi yang berakhlak, berprestasi dan mandiri dan berwawasan lingkungan. Visi menengahnya 'Menjadi Sekolah Terbaik se-Kalimantan pada Tahun 2020 untuk Tingkat SD'. Visi tersebut diwujudkan dalam 14 Jaminan Kualitas atau *Quality Assurance* lulusan SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin yang dikenal dengan BBMB (Berakhlak, Berprestasi, Mandiri,

dan Berwawasan Lingkungan). Sedangkan Misi SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin adalah (1) menjadi lembaga pendidikan berbasis dakwah; (2) menjadi lembaga pendidikan percontohan; dan (3) menjadi lembaga pendidikan berwawasan lingkungan.⁹¹

Selanjutnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan ini ada SDN Kelayan Tengah 2 yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Bersama Rt.21 No.24 Banjarmasin. sekolah ini dikategorikan lembaga pendidikan yang memiliki jumlah siswa untuk Kecamatan Banjarmasin Selatan. Keadaan sekolah ini adalah sebagai berikut; akses untuk menuju ke sekolah tidak mudah, karena harus melewati jalan kecil dan padat penduduk. Terdapat 6 ruangan (kelas) yang masing-masing kelas memiliki 1 ruangan. Pada tahun 2016-2017, jumlah siswa yang masuk sebanyak 14 orang siswa, sedangkan pada tahun 2017-2018 sebanyak 9 orang siswa, sementara jumlah keseluruhan siswa pada tahun ajaran 2017/2018 adalah 66 orang. Sekolah ini memiliki lapangan/halaman yang sangat tidak layak, karena tergenang air atau seringkali berlumpur.⁹²

Kurikulum yang digunakan pada SDN Kelayan Tengah ini adalah Kurikulum KTSP dari kelas I sampai kelas VI. Kegiatan ekstra kurikuler berupa Seni Tari dan Teater (pantomim). Sementara prestasi yang pernah diraih adalah Juara Umum Lomba Pantomim se-Kota Banjarmasin Tahun 2017. Sebagian besar tempat bekerja orang tua/wali murid dekat dengan lokasi sekolah. Sementara tingkat ekonomi orang tua/wali siswa di sekolah ini adalah dari menengah ke bawah, seperti buruh dan tukang becak. Menurut Kepala Sekolah, sedikitnya jumlah

⁹¹ Profil Sekolah SDIT Ukhuwah Juli 2017-2018.

⁹² Observasi Lapangan, Kamis 20 Juli 2017.

siswa yang masuk (mendaftar) di sekolah ini, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keberadaan sekolah-sekolah lain yang relatif lebih baik. Selain itu, penduduk yang tinggal di sekitar sekolah sudah banyak yang pindah rumah dengan berbagai alasan. Namun sebenarnya jumlah siswa yang sedikit tersebut malah bisa menjadi keunggulan bagi sekolah, hal ini membuat guru-guru lebih mudah mengkondisikan para siswa di masing-masing kelas.⁹³

(2) Pendidikan Tingkat Menengah

Di Kecamatan Banjarmasin Selatan ada SMPN 8 yang dikategorikan sekolah yang memiliki jumlah siswa terbanyak. Sekolah ini beralamat di Jalan Gerilya No.54 Rt.18 Kelurahan Tanjung Pagar. Hampir 90% siswa di SMPN 8 ini berasal dari wilayah sekitar yang dekat dengan sekolah dengan mata pencaharian orang tua sebagai buruh angkut di pasar-pasar. Sementara kurang dari 10% siswa bertempat tinggal agak jauh dari sekolah dengan mata pencaharian orang tua sebagai petani yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah perbatasan antara Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, Tatah Pemangkih, Tatah Belayung dan Tatah Layap. Pada tahun ajaran 2017-2018 sekolah ini menerima 8 ruang belajar dengan jumlah 1 ruang sebanyak 32 orang siswa, sementara jumlah keseluruhan siswa baru sebanyak 256 orang siswa.⁹⁴

Keunggulan-keunggulan sekolah ini yang bisa dijual kepada masyarakat diantaranya adalah letak sekolah yang berada di pinggir Jalan Gerilya sebagai jalan utama, sekolah ini juga

⁹³ Wawancara dengan Bapak Syarbaini, S.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri Kelayan Tengah 2, Kamis 20 Juli 2017.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Masdan Ruzani, S.Pd, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 8 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

sudah mengembangkan sekolah yang berwawasan adiwiyata, yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berwawasan lingkungan, hasil dari pendidikan tersebut diharapkan siswa dapat menerapkan kecintaannya pada lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing. Keunggulan lainnya adalah pada pembinaan kaderisasi di organisasi pramuka sekolah, pada beberapa *event* dengan sekolah-sekolah lain, sekolah ini selalu mendapatkan prestasi.

Sementara di Kecamatan Banjarmasin Selatan ini pula ada SMP PGRI 2 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani km.5,5 Banjarmasin. Sekolah ini dikategorikan sekolah yang memiliki jumlah siswa terendah. Sekolah ini sebenarnya sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup, berupa gedung yang permanen, laboratorium, computer, dan buku-buku. Namun selain minimnya prestasi sebagai sarana untuk ‘dijual’ ke masyarakat dalam rangka menarik minat siswa dan para orang tua, dampak dari anggapan masyarakat bahwa sekolah swasta jauh dari bermutu juga sudah terlanjur melekat.⁹⁵

3. Faktor-Faktor Dominan Penyebab Utama Disparitas Mutu Pendidikan Antar Kecamatan di Kota Banjarmasin

a. Faktor Layanan Pendidikan yang Diberikan oleh Satuan Pendidikan

Layanan pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan diminatnya sekolah. Untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Sekolah Dasar Sabilal Muhtadin pada tahun ajaran

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Sumadi, S.Pd, Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

2017/ 2018 ini berjumlah 900 orang siswa lebih. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas SD Sabilal Muhtadin ini mengerahkan 54 orang guru tetap yayasan, 18 orang guru bulanan, dan 24 orang guru Al-Quran orang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, disamping mereka harus punya kemampuan dalam membaca Al-Qur`an dengan baik. Perpaduan antara ilmu agama dan umum, kualitas akademik dan non akademik yang sudah terbukti di berbagai bidang dan kurikulum yang diselenggarakan sekolah dalam bentuk kegiatan kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler menjadi alasan utama para orang tua siswa menjadikan sekolah ini sebagai pilihan. Namun yang paling utama adalah karena muatan agamanya yakni Al-Quran dan Tahfiz sebagai program unggulan.

Sekolah juga sudah menerapkan Kurikulum 2013, walaupun ada beberapa kelas yang masih menggunakan Kurikulum KTSP. Disamping Kurikulum 2013 dan Kurikulum KTSP, sekolah ini juga mengkombinasikan dengan Kurikulum Agama. Hal ini bertujuan agar siswa mempunyai pengetahuan umum dan agama dengan kualitas sama baiknya dan tersebut diatur seimbang.⁹⁶ Penanaman nilai-nilai karakter melalui pembiasaan shalat berjamaah dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu komitmen sekolah untuk menjadikan Al-Quran metode Tilawah dan Tahfizh sebagai program unggulan diberi porsi lebih banyak pada setiap harinya, selain Bahasa Arab, Tamyiz, dan Baca Tulis Al-Quran. Kegiatan pembelajaran *full day school* dari Senin sampai Jum`at, serta hari Sabtu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti seni tari, lagu-lagu

⁹⁶ Ignasius Nurjaya, Kepala Sekolah SD Sabilal Muhtadin, Selasa 18 Juli 2017.

daerah dan kreasi lokal lainnya. Layanan pendidikan seperti inilah yang biasanya membuat sebuah lembaga pendidikan dibanjiri peminat. Selain itu, seperti yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah 7 dengan melengkapi ekstrakurikuler berupa *drumband*, ditambah kegiatan keagamaan lain di Masjid seperti sholat Tahiyatul Masjid, Sholat Dhuha, Tadarus Al-Qur'an, dan Kuliah Tujuh Menit (Kultum), setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan proses KBM di kelas.⁹⁷

Untuk lembaga pendidikan tingkat menengah, layanan pendidikan yang harus diperhatikan agar sekolah memiliki jumlah siswa yang banyak maka sekolah harus didukung dengan fasilitas, sarana prasarana pendidikan yang lengkap, juga banyaknya pilihan kegiatan ekstrakurikuler diluar jam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat menunjang proses pembelajaran dengan sistem *full day school*. Juga harus ada laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan jaringan *wifi*.⁹⁸ Selain itu juga harus ada kegiatan pramuka, bina vokal, musik gitar, musik piano, dan *English Club*. Penguatan dalam mata pelajaran tertentu, seperti Matematika dan Bahasa Inggris, layanan bimbingan belajar, dan program kunjungan ke orang tua murid untuk memperkuat kerjasama.⁹⁹

Untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu seperti SDIT Nurul Fikry yang keadaan tingkat ekonomi orang tua/wali murid dari menengah ke atas, maka layanan pendidikan yang harus ditingkatkan adalah ekstra kurikuler Futsal, Tilawah, *Khot* (kaligrafi), Menulis (cerita pendek), Bela Diri (Kempo), Renang,

⁹⁷ Observasi di SD Muhammadiyah 7 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

⁹⁸ H. Muhammad Yustan Adhli, M.Pd, Wakil Kepala Sekolah SMPN 6 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2017.

⁹⁹ Ismail Panggabean, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Advent, Senin 17 Juli 2017.

Badminton, Pidato (*da'i cilik*), Teater, *English Club* dan *Arabic Club*, karena mereka lebih menyukai anaknya belajar Agama Islam, selain itu jam sekolah yang dianggap sesuai dengan jam bekerja, yaitu sistem *full day school*, ditambah layanan pendidikan dengan website sendiri dan e-mail.¹⁰⁰ Selanjutnya ditambahkan, untuk menjaga potensi lokal dan kualitas layanan yang dapat diunggulkan sebaiknya sekolah berada dalam satu kompleks saja, sehingga memudahkan dalam pengawasan proses pembelajaran, yang memudahkan para orang tua untuk antar jemput anaknya. Layanan pendidikan berupa pelaksanaan Kurikulum 2013 dan ekstrakurikuler Tahfiz, HW/Pramuka, Seni Tari Daerah, Tapak Suci, dan sering menjadi tempat pelaksanaan lomba-lomba untuk Taman Kanak-Kanak.¹⁰¹

Untuk layanan pendidikan tingkat menengah di Kecamatan Banjarmasin Barat, selain kegiatan ekstra kurikuler sekolah seperti Pramuka, PMR, Paskibra, Futsal, Basket, Bola Volly, Bulu Tangkis dan Pencak Silat, sekolah juga harus dilengkapi dengan laboratorium komputer/multimedia, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa (Inggris) dan laboratorium keterampilan, dengan tetap melaksanakan Kurikulum 2013 untuk semua kelas.¹⁰² Bahkan kalau perlu seperti yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP H. Johansyah yang tetap menggratiskan seluruh biaya sekolah, dengan tidak ada pungutan tertentu layaknya sekolah swasta yang lain.¹⁰³ Seluruh biaya operasional sekolah diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

¹⁰⁰ Ismail Panggabean, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Advent, Senin 17 Juli 2017.

¹⁰¹ Norheliyana Hasanah, S.Pd, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1, Senin 17 Juli 2017.

¹⁰² Satoli, S.E., M.M., Kepala Sekolah SMPN 12 Banjarmasin, Senin, 17 Juli 2017.

¹⁰³ Drs. Rusman, Kepala Sekolah SMP H. Johansyah Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDIT Permata Jannati di Kecamatan Banjarmasin Utara yang dikategorikan memiliki jumlah siswa terendah mengatakan mereka sebenarnya sudah melaksanakan Kurikulum 2013 dan berbasis Alquran dan Hadits. Sarana dan prasarana sudah sangat memadai, semua kelas memiliki LCD proyektor dan ruang full AC. Sarana bermain murid lengkap dengan kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, *robotic* dan multimedia, tilawah, *cooking* dan *drawing class*, taekwondo, kunjungan ke Panti Asuhan, *waterboom*, bioskop 6 dimensi, pramuka, melukis, tari, *zoo*, dan lain-lain.¹⁰⁴ Potensi lokal dan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang diandalkan adalah program khusus Tahfiz Al-Qur`an, anak diproyeksikan hapalan 4 sampai 10 juz setelah tamat. Sering dilakukan *muraja'ah* (pengulangan) setoran hapalan Alquran yang dilakukan setiap hari. Kegiatan ini dilakukan secara formal dan melalui ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah juga sangat memperhatikan pembentukan karakter (*character building*) sejak usia dini.

b. Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar terutama orang tua siswa juga dianggap sebagai faktor dominan penyebab utama disparitas mutu pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin.

c. Faktor Geografis dan Demografis Kecamatan

d. Faktor Wilayah Tempat Bekerja Orang Tua Siswa

e. Faktor Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

¹⁰⁴ Heri, M.Kom, Ketua Yayasan/Kepala Sekolah SDIT Permata Jannati, Senin Tanggal 17 Juli 2017.

Menurut Kepala Sekolah SDIT Permata Jannati, Heri, M.Kom, Sekolah swasta tidak memakai sistem zonasi. Memang ada beberapa keuntungan sistem zonasi, yakni adanya pemerataan, sekolah kurang banyak murid diharapkan jumlah muridnya bisa meningkat. Mutu akademik, mutu non akademik, mutu guru, mutu sarana dan prasarana, atau lebih jauh mutu standar-standar pendidikan bisa dilakukan secara merata. Sedangkan kekurangannya adalah murid yang punya kecerdasan akan terhambat dengan sistem zonasi ini karena sekolah favorit yang diinginkan berada di Kecamatan yang berbeda. Keadaan ini sama dengan SD Muhammadiyah 1 yang juga tidak melaksanakan sistem zonasi ini dalam penerimaan peserta didik baru, menurut beliau hal ini dilakukan karena para orang tua cenderung memilih sekolah negeri dibanding sekolah swasta untuk pendidikan anak-anaknya. Sekolah hanya menunggu peserta didik yang kebetulan tidak diterima di sekolah lain atau menerima siswa pindahan dari sekolah lain.¹⁰⁵ Di sekolah ini angka perpindahan siswa yang masuk dan keluar juga cenderung tinggi, setiap awal tahun ajaran selalu ada orang tua yang mengurus surat pindah anak-anaknya, hal ini terjadi karena kebanyakan pekerjaan orang tua siswa adalah wiraswasta yang juga sering berpindah-pindah tempat.

Sementara itu, di sekolah swasta seperti SMP Al-Zam Zam juga tidak memakai sistem zonasi. Sistem zonasi hanya ada pada sekolah negeri, pihak sekolah hanya setuju dengan sistem zonasi terkait *plus*-nya yakni adanya pemerataan mutu yakni siswa bisa tersebar ke berbagai sekolah tidak menumpuk di sekolah favorit, jadi diharapkan juga ada penyebaran yang

¹⁰⁵ Ibu Norheliyana Hasanah, S.Pd, Kepala SD Muhammadiyah 1 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

masuk sekolah tidak favorit termasuk ke sekolah Al-Zam Zami. Pemerataan siswa baru diberbagai sekolah, orang yang cerdas dan finansial tak mampu bisa ditampung. Mutu akademik seperti UAN tersebar diberbagai sekolah. Harapannya mutu guru dan sarana dan prasarana bisa merata. Mutu yang sesungguhnya yakni kalau adanya pemerataan mutu. Bahkan standar *Human Deveopment Index* (HDI) pun pada tolok ukur kemajuan suatu bangsa berdasarkan pada pemerataan mutu, bukan pada keunggulan kompetensi individu, atau segelintir orang.

Sementara itu minusnya, meski ada sistem zonasi tapi sekolah menerapkan sistem rangking nilai, sehingga tetap saja sekolah unggulan akan tetap mendominasi. Dalam batas tertentu memang pada zona padat penduduk akan tetap ada persaingan yang tinggi. Masyarakat padat akan tetapi ketersediaan kelas terbatas maka persaingan tetap akan tinggi. Ada prioritas bagi yang dekat sekolah negeri misal jarak 1 km yang menjadi prioritas diterima, yang cerdas dekat sekolah akan mudah diterima, sementara yang cerdas dan jauh dari sekolah akan tidak terlalu mudah untuk diterima. Hal ini sangat berbeda dengan SMPN 15 yang sudah menerapkan sistem zonasi, lembaga pendidikan ini sangat diuntungkan karena di wilayah Kuin Utara ini terdapat beberapa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, otomatis lulusan SD/MI tersebut berpeluang besar menjadi peserta didik baru bagi SMPN 15.¹⁰⁶

Menurut Ismail Panggabean, S.Pd, SMP Advent ini tidak memakai sistem zonasi. Pihak sekolah setuju saja dengan sistem zonasi karena diharapkan akan terjadi pemerataan murid yang masuk, termasuk masuk ke sekolah SMP Advent. Namun kelemahan sistem ini menurut beliau dalam batas tertentu murid

¹⁰⁶ Sudiatmoko, Wakasek Bidang Kurikulum SMPN 15 Kuin Utara Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

pintar yang seyogyanya bisa lebih ditempa dan dibina agar potensinya bisa meningkat, bisa lebih maksimal kalau sekolah di sekolah unggulan. Akan tetapi karena sistem zonasi ini pula bisa jadi potensi tersebut tidak tersalur dengan baik dan akhirnya masuk ke sekolah biasa.

Berkaitan dengan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru pula, Kepala Sekolah SMP H.A Johansyah, Drs. Rusman terkesan pasrah dengan sistem tersebut. Beliau beranggapan bahwa sistem tersebut justru lebih menguntungkan sekolah tertentu yang selama ini sudah banyak peminat. Bagi beliau, sistem tersebut tidak memberikan keuntungan yang signifikan terhadap sekolah-sekolah swasta. Disisi lain, beliau menyayangkan sekolah-sekolah negeri yang senantiasa menerima sebanyak mungkin peserta didik baru tanpa memperhatikan standar pelayanan minimal dalam pendidikan. Beliau mengharapkan adanya pengawasan dari pejabat yang berwenang untuk membatasi penerimaan peserta didik baru, agar sekolah-sekolah lain mendapatkan peserta didik yang proporsional.

Sama halnya dengan SMP PGRI 2 Banjarmasin yang terkena dampak langsung dari sistem zonasi penerimaan murid baru tahun ini. Menurut Kepala Sekolah, selama ini siswanya berasal dari muntahan/sisa dari sekolah-sekolah negeri yang terdapat di sekitarnya, seperti SMPN 3 Banjarmasin, SMPN 8 Banjarmasin, SMPN 16 Banjarmasin, SMPN 18 Banjarmasin, dan SMPN 18 Banjarmasin. Menurut beliau lagi, itu kalau muntahan ada, kalau tidak ada maka sekolah tersebut tidak memiliki murid, seperti yang dialami SMP PGRI 2 ini yang untuk tahun ini tidak memiliki murid baru karena murid-murid yang bertempat tinggal di wilayah sekitar lebih memilih sekolah-sekolah negeri. Dengan keadaan yang seperti ini maka SMP PGRI 2 Banjarmasin dalam konteks zonasi ini tidak

mendapatkan porsi, sebagaimana kebanyakan SMP swasta yang lain.¹⁰⁷

Sama halnya dengan SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin yang memiliki memiliki total siswa baru 26 orang. Walaupun sekolah ini memiliki fasilitas standar yang lengkap dengan total guru 15 orang. Namun menurut Pak Ridwan, kebijakan zonasi penerimaan murid baru ini tidak ada pengaruhnya bagi peningkatan jumlah siswa, malah mengurangi motivasi belajar siswa yang hanya mengutamakan kelulusan saja bukan nilai/prestasi. Beliau menyarankan untuk kembali saja ke sistem awal yaitu berdasarkan nilai.¹⁰⁸

Untuk sekolah negeri seperti SMPN 6, yang sudah melaksanakan sistem zonasi ini pada penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2017/2018, menurut hasil wawancara bahwa sistem yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, yakni sistem zonasi PPDB dengan harapan dapat pemeratakan penerimaan siswa baru di setiap sekolah yang berada di Kabupaten/Kota. Jalur penerimaan siswa baru terbagi menjadi dua jalur, jalur dalam kota dan jalur luar kota. Untuk jalur dalam kota prioritas penerimaan didasarkan kepada zona yang terbagi dalam 4 kriteria, yaitu: Zona 1 untuk lingkungan dengan jarak 0 -1 km; Zona 2 untuk lingkungan dengan jarak 1 - 2 km; Zona 3 untuk lingkungan dengan jarak 2 - 3 km; dan Zona 4 untuk lingkungan dengan jarak 3 km atau lebih.¹⁰⁹ Sementara untuk SMPN 8 Banjarmasin, walaupun mereka sudah menerapkan sistem zonasi ini dari awal, namun dari pihak

¹⁰⁷ Sumadi, S.Pd, Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

¹⁰⁸ Ridwan, Guru di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2018.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Aksah, S.Pd, Wakasek Bidang Kesiswaan SMPN 6 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

sekolah ada dua pendapat yang mengemuka ketika menanggapi dilaksanakannya sistem zonasi ini, yaitu untuk apa lagi peringkat Nilai kalau memang memakai zona, karena terkadang anak-anak yang agak jauh tidak bisa tertampung walaupun mereka sebenarnya pintar, sementara itu ada siswa yang bertempat tinggal dekat bisa tertampung, meskipun sebenarnya mereka kurang pintar.¹¹⁰

Dalam penerapannya, apabila zona satu telah terpenuhi maka zona selanjutnya otomatis terseleksi dengan sendirinya karena sudah diatur oleh sistem. Seleksi berikutnya berdasarkan usia, dimana usia yang lebih tua dalam arti usia sama namun selisih bulan, maka bulan awal diprioritaskan lebih dulu. Kemudian, seleksi terakhir baru dilihat berdasarkan nilai. Sementara itu, untuk jalur masuk luar kota adalah membuka kesempatan bagi siswa yang tinggal di luar kota Banjarmasin dan berkeinginan sekolah di SMPN 6 Banjarmasin. Kuota yang dibuka sebanyak 13 orang atau 5 %, begitu juga dengan jalur kemitraan yakni siswa yang merupakan anak guru/karyawan di SMPN 6 Banjarmasin, komite sekolah, atau Dinas Pendidikan diperbolehkan untuk mendaftar dengan kuota sebanyak 5 %, sehingga untuk tahun ajaran 2017/2018 jumlah siswa yang diterima sebesar 288 siswa.¹¹¹

Selanjutnya, Bapak H. Muhammad Yustan Adhli, M.Pd sebagai Wakil Kepala SMPN 6 beliau berpendapat mengenai kebijakan zonasi penerimaan murid baru, menyarankan harus adanya ketetapan bobot/persentase antara calon siswa baru berdasarkan zonasi tempat tinggal dan siswa berprestasi. Karena

¹¹⁰ Wawancara dengan Masdan Ruzani, S.Pd, Wakasek Bidang Kesiswaan SMPN 8 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

¹¹¹ Wawancara dengan Aksah, S.Pd, Wakasek Bidang Kesiswaan SMPN 6 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

kebijakan zonasi ini telah menuai berbagai protes dari orang tua calon siswa khususnya siswa berprestasi yang ingin mendaftar ke sekolah ini, sehingga beliau meminta adanya evaluasi mengenai penerapan kebijakan ini.

Menurut Satoli, S.E., M.M. sebagai Kepala Sekolah di SMPN 12 Banjarmasin, terkait sistem zonasi ini secara umum setuju dan mendukung dengan adanya sistem zonasi yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2017/2018 ini, alasannya adalah dengan adanya sistem ini maka akan terjadi pemerataan secara akademik, dimana siswa/i dengan nilai baik secara akademik tidak terpusat pada satu atau dua sekolah saja yang seringkali disebut sebagai sekolah favorit, tetapi akan menjadi tersebar berdasarkan zona yang telah pemerintah tentukan, yaitu jarak dari rumah siswa ke sekolah. Sebagai informasi beliau mengatakan bahwa sistem pendaftaran secara *online* di sekolah-sekolah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya (sebelum tahun ajaran 2017/2018) memang memunculkan masalah, diantaranya adalah sistem pendaftaran berjalan relatif lambat dan terkadang mengalami *error* dikarenakan jaringan komunikasi yang masih belum stabil. Akibatnya, ada calon siswa yang mendaftar disebuah sekolah yang sudah dipilih, tetapi setelah diperiksa, ternyata belum terdaftar. Sebaliknya, beberapa sekolah memiliki calon siswa yang sejatinya tidak mendaftar di sana, tapi malah terdaftar.¹¹²

Menurut Ignasius Nurjaya, SD Sabilal Muhtadin, adalah Sekolah Dasar Islam Swasta yang pendaannya lebih banyak secara mandiri. Sehingga mereka tidak memberlakukan sistem zonasi penerimaan siswa baru 2017 dan tidak mendapat pengaruh yang positif maupun negatif dari sistem tersebut, mengingat secara

¹¹² Satoli, S.E., M.M., Kepala Sekolah SMPN 12 Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2018.

geografis SD ini terletak di tengah pusat pemerintahan. Namun mereka memberikan pendapat berdasarkan hasil penilaian dan keluhan sekolah sekitar yang telah menerapkan sistem ini. Dampak positifnya yakni adanya pemerataan kuantitas siswa di sebagian sekolah. Namun negatifnya bahwa sekolah harus mau menerima siswa dengan kemampuan dasar bagaimanapun juga, dampak ini sangat terasa bagi sekolah- sekolah unggulan. Sedangkan siswa yang berada pada zona dimana tidak terdapat sekolah unggulan sementara dirinya punya kemampuan tersebut pun merasakan dampak yang sama. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menerapkan sistem tersebut harus memperhatikan keberagaman kesejahteraan siswa yang terdiri dari sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia. Tanggapan ini senada dengan pendapat Bapak Syarifani, Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikry terkait zonasi yang menurut beliau tidak terlalu berpengaruh terhadap sekolah, karena pada sekolah swasta, sistem zonasi tidak diberlakukan.¹¹³

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Mardiatul, S.Pd, Kepala Sekolah Harapan Bunda, Senin 17 Juli 2017.

BAB IV

BERBAGAI UPAYA DALAM MENGURANGI DISPARITAS MUTU PENDIDIKAN DI KOTA BANJARMASIN

1. Rekomendasi Kebijakan yang Tepat untuk Mengurangi Disparitas Mutu Pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin

Menurut Kepala Sekolah SDIT Permata Jannati Heri, M.Kom, mutu guru sebagai ujung tombak pendidikan harus diupayakan merata mutunya disemua sekolah. Guru berkualitas dan guru teladan jangan hanya ditempatkan di sekolah-sekolah unggulan, seharusnya guru-guru tersebut juga ditempatkan di sekolah pinggiran, sehingga diharapkan ada pemerataan mutu sekolah. Kualitas pendidikan guru-guru tersebut harus terus ditingkatkan.¹¹⁴ Selain itu, beliau juga mengatakan perlu pemetaan dana, jangan sampai dana yang digulirkan hanya pada sekolah-sekolah yang sudah favorit. Karena bagaimana mungkin ada pemerataan kalau dana tidak bergulir pada sekolah pinggiran. Jangan sampai nanti katanya yang kaya makin kaya sementara yang miskin makin miskin. Memang sekolah unggulan tidak mesti dihapus sama sekali, sekolah unggulan diperlukan sebagai percontohan, sebagai model dan panutan yang sebagiannya bisa ditiru oleh sekolah lainnya. Akan tetapi jangan sampai terjadi kesenjangan yang tinggi antara sekolah

¹¹⁴ Wawancara dengan Ketua Yayasan/Kepala Sekolah SDIT Permata Jannati, Heri, M. Kom, Senin 17 Juli 2017.

yang unggulan dan sekolah yang belum unggulan. Pada dasarnya, setiap sekolah punya ciri khas unggulan yang belum tentu dimiliki oleh sekolah lainnya termasuk yang dikenal sebagai sekolah unggulan sekalipun. Misalnya saja di sekolah ini kata beliau, punya program Tahfiz Alquran yang belum tentu dimiliki oleh sekolah lainnya di berbagai Kecamatan lainnya.¹¹⁵

Menurut Syarifani sebagai Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikry, untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah, antara lain harus ada pemerataan Sumber Daya Manusia yang ada di setiap sekolah, seperti guru-guru, misalnya terkait akhlak. Karena ada kasus di sebuah sekolah, dimana gurunya seringkali mencubit murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Selain itu harus ada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Kelengkapan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar merupakan daya tarik dan pertimbangan bagi para orang tua yang akan memasukkan anaknya di sebuah sekolah.¹¹⁶

Menurut Bapak Husaini, S. Pd, Kepala Sekolah SMP Al-Zam Zam, untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan maka perlu sarana dan prasarana yang memadai secara merata. Adanya BOS Daerah bagi sekolah swasta seyogyanya tetap diberikan kalau memang ingin pemerataan. Sistem zonasi seyogyanya meniscayakan diteruskannya kembali BOS Daerah kepada sekolah swasta, jangan hanya sekolah negeri yang diberi bantuan. Kalau murid menyebar seyogyanya dana pendukung misal BOS Daerah juga menyebar, karena akan tidak seimbang kalau murid menyebar tapi dananya tidak

115

¹¹⁶ Syarifani, Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikry Banjarmasin, Selasa 18 Juli 2017.

menyebar. Yang perlu diperhatikan bahwa sekarang ini hanya sekolah yang punya klasifikasi tertentu seperti klasifikasi A atau B yang dapat bantuan, sementara sekolah yang klasifikasinya tidak tinggi tak dapat bantuan. Secara logika kondisi ini akan '*mempermanenkan kemiskinan sekolah*' sehingga sekolah tidak akan pernah atau sangat sulit untuk maju. Sekolah yang maju makin maju, sementara yang mandek semakin mandek atau setidaknya jalan di tempat saja. Selain itu perlu pemerataan mutu akademik, mutu non akademik, mutu dan jumlah siswa yang masuk, mutu standar pendidikan nasional.¹¹⁷

Menurut Ismail Panggabean, S.Pd, kualitas untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan maka guru-guru perlu ditingkatkan terus secara merata. Perlu adanya pelatihan yang nyata. Sarana prasarana yang merata dan diberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan berbagai sarana dan prasarana tersebut. BOS Daerah juga harus diberikan kembali ke sekolah swasta apalagi kalau sudah diberlakukan sistem zonasi.¹¹⁸

Menurut Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, sekolah mereka adalah Sekolah Dasar Islam Swasta yang pendaannya lebih banyak secara mandiri. Sehingga mereka tidak memberlakukan sistem zonasi penerimaan siswa baru 2017-2018. Namun mereka memberikan pendapat berdasarkan hasil penilaian dan keluhan sekolah sekitar yang telah menerapkan sistem ini. Dampak positifnya yakni adanya pemerataan kuantitas siswa di sebagian sekolah, bagi sekolah yang sedikit siswanya akan terbantuan dengan sistem ini karena biasanya masyarakat sekitar lebih memilih sekolah yang jauh

¹¹⁷ Husaini, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Al-Zam Zami, Senin 17 Juli 2017.

¹¹⁸ Ismail Panggabean, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Advent, Senin 17 Juli 2017.

namun favorit. Hanya saja lokasi sekolah di daerah Banjarmasin sebagian terfokus pada satu Kelurahan. Adapun negatifnya, sekolah favorit akan mengalami penurunan siswa karena sistem ini. Di samping siswa itu sendiri merasa kecewa karena dengan potensi yang mereka miliki tidak dapat mengenyam pendidikan sebagaimana yang mereka harapkan. Hal ini disebabkan perbedaan kualitas layanan yang diberikan oleh setiap sekolah sehingga untuk saat ini sistem tersebut masih dinilai belum layak diterapkan sebelum adanya keseragaman fasilitas dan Sumber Dana Manusia.¹¹⁹

2. Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan antar Kecamatan di Kota Banjarmasin

Sistem zonasi ini pun kemudian menuai beberapa kritikan baik itu dari para orang tua siswa maupun para guru. Keinginan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang sudah memiliki *brand* tertentu menjadi terkendala, sehingga kemudian sebagian besar mereka mengalihkan anaknya untuk bersekolah ke sekolah swasta yang Berbasis Agama. Begitu juga yang dirasakan oleh beberapa siswa, dimana mereka sangat bersaing dan memacu diri mereka untuk mendapatkan nilai yang baik karena ingin melanjutkan ke sekolah favorit yang mereka inginkan menjadi kandas. Inilah kemudian salah satu hal yang menjadikan motivasi belajar mereka menjadi menurun.¹²⁰ Masukan yang diberikan oleh guru tentang pelaksanaan sistem zonasi ini alangkah baiknya apabila ditentukan saja presentase

¹¹⁹ Ir. Hj. Tri Hariani Sawitri, S.Pd, dibantu Suhrawardi, S.Ag. S.Pd., Kepala Urusan Kesiswaan, dan Miftah Khait, S.H.I., Staf Tata Usaha Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 9, Selasa 18 Juli 2017.

¹²⁰ Aksah, S.Pd, Wakasek Bidang Kesiswaan SMPN 6 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

jumlah siswa yang diterima melalui sistem zonasi. Seperti halnya di Yogyakarta, hanya 20 % saja jumlah siswa yang diterima melalui sistem zonasi, kemudian sisanya diseleksi berdasarkan nilai. Sehingga yg memiliki ambisi atau bercita-cita menuju sekolah favorit dapat tersalurkan dan juga tidak menimbulkan gejala di masyarakat.

Adanya penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2017/2018 tidak banyak membawa pengaruh bagi sekolah-sekolah swasta seperti SD Muhammadiyah 7. Tidak banyak saran yang diberikan oleh Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah peserta didik di sekolah. Menurut beliau, penambahan ruang belajar di sekolah-sekolah dasar negeri menjadi salah satu pemicu berkurangnya jumlah siswa di beberapa sekolah swasta, karena otomatis kuota penerimaan siswa di sekolah-sekolah tersebut menjadi lebih banyak.¹²¹ Sehingga, adanya kebijakan akan pembatasan atau pemerataan kuota penerimaan siswa baru dapat berimplikasi terhadap pengembangan sekolah-sekolah negeri.

Menurut Kepala Sekolah SD Sabilal Muhtadin, untuk mengurangi kesenjangan kualitas sekolah antar Kecamatan di Kota Banjarmasin adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan guru-guru dan siswa. Kesejahteraan yang dimaksudkan disini adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana dan juga peningkatan kompetensi guru dalam upaya meningkatkan profesionalisme sebagai tenaga pendidik. hal inilah juga yang menjadi tips jitu bagi sekolah untuk selalu meningkatkan kualitas sekolah.¹²² Guna meningkatkan profesionalisme kerja maka sekolah memfasilitasi tenaga

¹²¹ Gafuri Rahman, S.Pd, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7 Banjarmasin, Senin 17 Juli 2017.

¹²² Ignasius Nurjaya, Kepala Sekolah SD Sabilal Muhtadin, Selasa 18 Juli 2017.

pendidik untuk mengikuti berbagai pelatihan, workshop yang diselenggarakan pihak luar maupun pihak sekolah sendiri. Mereka juga melaksanakan KKG mini untuk satu rumpun studi, disamping KKG yang dilaksanakan oleh Rayon atau Kecamatan.

Menurut Kepala Sekolah dan Kepala Urusan Kesisiwaa SD Muhammadiyah 9 bahwa kesenjangan kualitas yang dimaksud bukan hanya kesenjangan domestik rayon, namun juga kesenjangan kualitas pendidikan Daerah dengan Nasional, sehingga siswa harus siap bersaing dimanapun mereka berada. Upaya yang barang tentu sangat signifikan adalah: Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui kemitraan dengan berbagai lembaga atau instansi; Kedua, kemitraan antar sekolah dalam rayon atau berdekatan. Seperti pemanfaatan sarana dan prasarana bersama guna perolehan pengalaman belajar yang hampir sama; Ketiga, sekolah sitem pamong, artinya sekolah yang dinilai berhasil dapat berbagi bukan saja dalam bentuk ceramah namun pembimbingan intensif, bahkan dalam hitungan bulan hingga sekolah tersebut dapat berjalan secara mandiri, dengan catatan tidak mengurangi insentif yang mereka peroleh di sekolah asal.

Menurut Syarbaini, S.Pd., SDN Kelayan Tengah 2 tidak banyak terpengaruh dengan sistem zonasi yang diberlakukan tahun ajaran baru ini, sebagai Kepala Sekolah beliau berpendapat bahwa untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah, antara lain adalah: (1) Sekolah harus memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi; (2) Sekolah harus memiliki lapangan yang memadai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya; (3) Sekolah harus memiliki guru-guru yang berkualitas terutama yang sudah diangkat menjadi PNS.¹²³

¹²³ Syarbaini, S.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri Kelayan Tengah 2, Kamis 201 Juli 2017.

Persaingan dalam dunia pendidikan merupakan keniscayaan yang sulit dihindari, sehingga masing-masing lembaga ingin memperkuat mutunya. Tetapi ukuran mutu pendidikan sesungguhnya bagi sebuah negara, bagi sebuah daerah tidak ditentukan oleh segelintir lembaga pendidikan yang maju. Tetapi suatu bangsa, suatu daerah dianggap maju dalam dunia pendidikannya kalau mutu tersebut merata berada dalam semua lembaga pendidikan. Oleh karena, peran pemerintah, para pendidik, masyarakat, orangtua dsb akan selalu diperlukan untuk selalu bersinergi dalam rangka pemerataan mutu pendidikan. Perlu terus dilakukan uji publik, perlu evaluasi terus menerus dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Doriza, S., Purwanto, D.A., & Maulida, E. “Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 14, Nomor 2, Desember 2013, h. 223-233.
- Gunawan, Imam. 2010. *Hubungan Ketersediaan, Alokasi Penggunaan, dan Ketaatan Peraturan Penggunaan Dana dengan Mutu Pendidikan SMA Negeri Se-Kota Malang*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Banjarmasin: Perpustakaan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Jaya, Dian Rifia. 2013. *Strategi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Banjarmasin: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Kartini, Ajeng. 2007. *Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Banjarmasin: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Megasari, D.N., & Purnastuti. “Disparitas Gender dalam Tingkat Pengambilan Investasi Pendidikan di Jawa Barat”. *Jurnal Economia*. Volume 12, Nomor 1, April 2016. h. 23-31.

- Nurdjannah. 2013. *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah I Palangka Raya*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Banjarmasin: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. 2017. *Data Tabel Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta Per-Kecamatan Tahun 2016-2017*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. 2017. *Data Siswa Menurut Tingkat Per-Kecamatan Tahun 2016-2017*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. 2017. *Data Siswa SMP Negeri dan Swasta Per-Kecamatan Tahun 2016-2017*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. 2017. *Data Sarana Prasarana Sekolah Dasar Per-Kecamatan Tahun 2016-2017*. Banjarmasin: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Rahayu, A. "Gender Gap dalam Distribusi Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Buletin Ekonomi*. Volume 8, Nomor, 1, April 2010. h. 1-70.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahril, M. 2015. *Aktifitas Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan Bermutu*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Banjarmasin: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin

Profil Para Penulis

Dr. H. Yahya Mof, M.Pd. Dosen (Lektor Kepala) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ((FTK) UIN Antasari. Sejak 2018-sekarang sebagai Ketua LP2M UIN Antasari.

Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd. Dosen (Lektor) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Antasari. Sejak 2018-sekarang sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari.

Afifah Linda Sari, M.Pd. Dosen (Lektor) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Antasari. Sejak 2019-sekarang sebagai Sekretaris Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Antasari.

Dr. M. Daud Yahya, S.Ag, M.Ag. Dosen (Lektor Kepala) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Antasari. Sejak 2018-sekarang sebagai Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam (Pusjibang-PI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Antasari. Mempunyai kenangan bersama tim kerja pengurus-pengurus lainnya selama di Pusjibang-PI FTK UIN Antasari antara lain : Kerjasama dengan RRI Banjarmasin untuk acara Lentera Kehidupan, Kerjasama dengan TVRI Kal-Sel untuk acara Fokus Islami, Kerjasama dengan Banjarmasin Post Serambi Ummah terkait artikel dosen, Kerjasama madrasah pengabdian/madrasah binaan Pusjibang-PI FTK UIN Antasari, pesantren Ramadhan, berbagai pelatihan, orientasi perdamaian moderasi beragama, penguatan Blended Learning, berbagai model pembelajaran,

berbagai model pembelajaran online/E-Learning, tutorial pembelajaran di Youtube dan TV channel Pusjibang-PI dan media sosial lainnya/kalender, temu ilmiah/seminar nasional-seminar internasional, penulisan penerbitan buku-buku terkait sistem (sejarah-profil-tata kelola-atribut2) organisasi Pusjibang-PI dan penerbitan buku-buku terkait Pendidikan Islam/Pendidikan/kumpulan ceramah/hasil penelitian dsb, Penelitian internal untuk kepentingan pengembangan kampus/madrasah pengabdian binaan, penelitian eksperimen, penelitian eksternal dengan Kerjasama penelitian dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Tingkat Provinsi Kal-Sel/LP2M UIN Antasari, dan lain-lain sehingga memperkuat Tri Dharma PT, Tri Pusat Pendidikan, layanan BKD dan kenaikan pangkat dsb dan memperkuat akreditasi seperti selama ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan yang ada. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat pahala dan ridha Allah SWT Amin YRA. Pengalaman : Alhamdulillah pernah ikut lulus casting menjadi pemain film layar lebar Sejarah Perang Banjar Pangeran Antasari. Pernah bikin lirik lagu dengan judul “Untukmu Pusjibang-PI” dan aransemen musik diracik bersama teman.